

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI**

**KOMUNIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG
PEMBATALAN BENDUNGAN ROKAN KIRI DI
KECAMATAN ROKAN IV KOTO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)
Pada Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Riau**

WIDIA ASTUTI

**NPM : 179110161
PROGRAM STUDI : ILMU KOMUNIKASI**

**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Widia Astuti
NPM : 179110161
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Hari/Tanggal Seminar: 21 April 2021
Judul Penelitian : Komunikasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten
Rokan Hulu Tentang Pembatalan Bendungan Rokan Kiri Di
Kecamatan Rokan IV Koto

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 16 Juni 2021

Menyetujui
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Eka Fitri Qurnawati, M.I.Kom

Pembimbing

Eko Hero, M. Soc, Sc

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Widia Astuti
NPM : 179110161
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Hubungan Masyarakat (Humas)
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Hari/Tanggal Komprehensif : Rabu / 21 April 2021
Judul Skripsi : Komunikasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tentang Pembatalan Bendungan Rokan Kiri Di Kecamatan Rokan IV Koto

Naskah ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Komunikasi dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 16 Juni 2021

Tim Seminar

Anggota,

Ketua,

Eko Hero, M. Soc. Sc.

Yudi Daherman, M. I. Kom

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Anggota

Cutra Aslinda, M. I. Kom

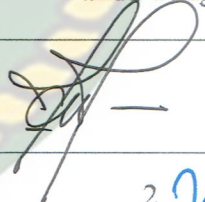
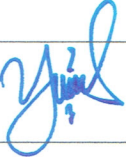
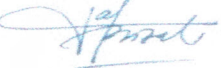
Dr. Dafrizal, M. Soc., Sc

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Nomor : 0365 /UIR-Fikom/Kpts/2021 Tanggal 15 April 2021 maka dihadapan Tim Penguji hari ini Rabu Tanggal 21 April 2021 Jam : 11:00 – 12:00 . WIB bertempat di ruang Seminar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa atas :

Nama : Widia Astuti
NPM : 179110161
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Hubungan Masyarakat (Humas)
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : “Komunikasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tentang Pembatalan Bendungan Rokan Kiri Di Kecamatan Rokan IV Koto”
Nilai Ujian : Angka : “86,92” ; Huruf : “A”
Keputusan Hasil Ujian : Lulus
Tim Penguji :

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Eko Hero, M. Soc, Sc	Ketua	1. 
2.	Yudi Daherman, M, I. Kom	Penguji	2. 
3.	Dr. Dafrizal, M. Soc., Sc	Penguji	3. 

Pekanbaru, 21 April 2021

Pjs. Dekan



Cutra Aslinda , M. I.Kom

**KOMUNIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
ROKAN HULU TENTANG PEMBATALAN BENDUNGAN ROKAN KIRI
DI KECAMATAN ROKAN IV KOTO**

Yang diajukan oleh :

Widia Astuti

179110161

Pada Tanggal :

16 Juni 2021

Mengesahkan

Pjs. DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI



Cutra Aslinda, M. I. Kom

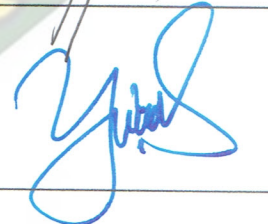
Tim Penguji

Tanda Tangan,

Eko Hero, M. Soc, Sc

Yudi Daherman, M. I. Kom

Dr. Dafrizal, M. Soc, Sc



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Widia Astuti
Tempat/Tanggal Lahir : Kubang Buaya/ 13 Februari 1999
NPM : 179110161
Konsentrasi : Hubungan Masyarakat
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Alamat/No Tlp : Jl. Karya 1, Block B. No. 20/ 082268749265
Judul Skripsi : Komunikasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan
Hulu Tentang Pembatalan Bendungan Rokan Kiri Di
Kecamatan Rokan IV Koto

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Skripsi) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademi, baik di Universitas Islam Riau maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali pengarahan Tim Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acua dalam daftar pustaka.
4. Bersedia untuk mempublikasikannya karya tulis saya (Skripsi) di jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.
5. Pernyataan ini sesungguhnya dan apabila kemudia hari terdapat penyimpangan dari apayang saya katakan di atas (poin1-3), maka saya bersedia menerima saksi pembatalan nilai skripsi dan atau pencabutan gelar akademik kesarjanaan saya dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2021

Yang, Menyatakan




Widia Astuti

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT, yang senangtiasa memberikan rahmat dan ridho kepada hamba-Nya. Sholawat serta salam kepada nabi Muhammad SAW yang menuntut umat manusia kepada jalan yang diridhoi oleh ALLAH SWT. Tugas akhir ini dipersembahkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan untuk peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir ini selesai mereka adalah:

Keluarga khususnya kedua orang tua Ibu Ramina(Almarhu mah) dan Bapak Fadri(Almarhum), Abang tercinta Doni Aditia, Kakak tersayang Siskar Dewi dan keluarga lainnya yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil.

Teman-teman kampus yang selalu membantu maupun teman sepermainan diluar kampus yang menyemangati untuk segera menyelesaikan tugas akhir perkuliahan.

Dosen-dosen Fakultas Komunikasi maupaun petugas TU yang membantu melancarkan pengerjaan maupun pengurusan tugas akhir ini.

Dan yang terakhir kepada semua pihak yang telah terkait dalam pengerjaan tugas akhir ini yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu, terimakasih banyak semuanya.

MOTTO

“BARANG SIAPA MENEMPUH JALAN UNTUK MENDAPATKAN ILMU
ALLAH AKAN MEMUDAHKAN BAGINYA JALAN MENUJU SURGA”

(HR. MUSLIM)

“JANGAN PERGI MENGIKUTI KEMANA AJA JALAN AKAN BERJUNG
BUATLAH JALANMU SENDIRI DAN MENINGGAL JEJAK”

(WIDIA ASTUTI)



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian dengan judul **“Komunikasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tentang Pembatalan Pembangunan Bendungan Rokan Kiri Di Kecamatan Rokan IV Koto”** yang diajukan dengan tujuan melakukan penelitian sebagai tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) pada program studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan dukungan serta bantuan dari banyak pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada:

1. Dr. Abdul Aziz, S. Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.
2. Eka Fitri Qurniawati, M. I. Kom selaku ketua program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau dan selaku dosen penasehat Akademis yang telah meluangkan waktu, memberi masukan, nasehat dan bimbingan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan penulis sampai dengan saat in.
3. Eko Hero, M,Soc,Sc selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan motivasi, pendapat dan masukan yang sangat berarti serta telah meluangkan waktu dalam proses bimbingan di tengah Pandemi COVID-19 baik secara online maupun tatap muka.

4. Karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau yang telah membantu mengurus surat menyurat selama perkuliahan.
5. Buat kedua orang tua (Almarhum) dan keluarga yang turut memberikan dukungan, nasehat, arahan, serta doa yang tak pernah henti, sehingga buat penulis seperti ini.
6. Terimakasih buat Abang (Doni Aditia) dan kakak ipar (Sari Lendani) saya yang telah memberikan motivasi, doa,serta materi buat biaya kuliah saya.
7. Buat teman - teman seperjuangan , Yoga Martilova, Novi Safutri, Afriyan Athaariq yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
8. Buat teman kost Tiara Sri Mawarti, Arenda Wati, Ririn Harianti yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
9. Terimakasih buat Girl Squad yang telah membantu dan menyemangati peneliti dalam membuat usulan penelitian ini.
10. Terimakasih kepada Rio Andri yang telah banyak membantu dalam penyusunan proposal dan pengambilan data dilapangan.

Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih perlu mendapatkan perhatian dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis dengan lapang dada menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat memaksimalkan usulan penelitian ini. Agar dapat menjadi sebuah karya ilmiah yang baik nantinya.

Akhir kata semoga usulan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 1 April 2021 Penulis

WIDIA ASTUTI
NPM: 179110161



DAFTAR ISI

JUDUL (COVER)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN

Halaman Persembahan.....	i
Halaman Motto.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Model.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
Abstrak.....	xii
<i>Abstract</i>	xiii

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah Penelitian.....	13
C. Fokus Penelitian.....	14
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
1. Tujuan.....	15
2. Manfaat.....	15
a. Manfaat Teoritis.....	15
b. Manfaat Praktis.....	15

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA..... 16

A. Kajian Literatur.....	16
1. Komunikasi.....	16
2. Kebijakan Pemerintah Daerah.....	19
3. Komunikasi Pemerintah Daerah.....	24
4. Teori Pemuka Pendapat (<i>Opinion Leader</i>).....	28
B. Definisi Operational.....	33
1. Komunikasi.....	33
2. Kebijakan Pemerintah Daerah.....	34
3. Komunikasi Pemerintah Daerah.....	35
4. Teori Pemuka Pendapat (<i>Opinion Leader</i>).....	35

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	36
BAB III : METODE PENELITIAN.....	39
A. Pendekatan Penelitian.....	39
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	39
1. Subjek Penelitian.....	39
2. Objek Penelitian.....	40
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
1. Lokasi Penelitian.....	40
2. Waktu Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
1. Wawancara.....	42
2. Dokumentasi.....	43
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV : HASIL & PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
1. Gambaran Kecamatan Rokan IV Koto.....	46
2. Visi Dan Misi Kecamatan Rokan IV Koto.....	50
B. Hasil Penelitian.....	51
1. Hasil Wawancara.....	51
a. Informan 1 H. Abdul Haris S.Sos M.si.....	51
b. Informan 2 Rio Andri.....	58
c. Informan 3 Zulmanan.....	62
C. Pembahasan Penelitian.....	64
1. Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Dalam Menyampaikan Surat Pembatalan Bendungan Rokan Kiri.....	64
2. Pemuka Pendapat <i>Opinion Leader</i> Dalam Menyampaikan Surat Pembatalan Kepada Masyarakat Cipang Raya.....	69
BAB V : PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Bendungan Rokan Kiri.....	7
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	34
Tabel 3.1. Subjek Penelitian.....	39
Tabel 3.2. Rencana Penelitian.....	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Surat Penolakan Pembangunan Bendungan Rokan Kiri yang dikeluarkan oleh Bupati Rokan Hulu.....	10
Gambar 1.2.	Surat Penolakan Pembangunan Bendungan Rokan Kiri yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Provinsi Riau.....	12
Gambar 4.1.	Peta Posisi Kecamatan Rokan IV Koto.....	46
Gambar 4.2.	Objek Wisata Istana Raja Rokan.....	49
Gambar 4.3.	Bapak H.Abdul Haris S.Sos M.si.....	52
Gambar 4.4.	Masyarakat Cipang Raya Melakukan Demonstarsi Didepan Kantor Bupati.....	54
Gambar 4.5.	Saat Pemerintah Daerah Rohul Menyampaikan Surat Kepada Perwakilan.....	56
Gambar 4.6.	Rio Andri (Tokoh Muda Cipang Raya).....	58
Gambar 4.7.	Rio Andri Saat Menyampaikan Surat Pembatalan Kepada Masyarakat.....	61

DAFTAR MODEL

Model 4.1. Hasil Penelitian..... 68



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Pembimbing
- Lampiran 2 Surat Bupati
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 Pertanyaan Wawancara



ABSTRAK

KOMUNIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PEMBATALAN BENDUNGAN ROKAN KIRI DI KECAMATAN ROKAN IV KOTO

Widia Astuti

179110161

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana strategi komunikasi kebijakan pemerintah daerah Rohul tentang pembatalan pembangunan Bendungan Rokan Kiri di Kecamatan Rokan IV Koto. Penelitian ini menggunakan konsep strategi komunikasi yang terdiri dari perencanaan komunikasi, manajemen komunikasi, pendekatan serta proses evaluasi yang mengaju pada konsep pemuka pendapat (*opinion leader*). Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif telah digunakan terhadap informan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Rohul dalam menyampaikan surat kepada masyarakat adalah (1) melakukan perencanaan komunikasi dengan cara melakukan musyawarah dengan perwakilan tokoh masyarakat, adat, tokoh pemuda, dalam mengeluarkan surat pembatalan pembangunan Bendungan Rokan Kiri(2) Manajemen komunikasi dengan cara memilih orang yang dipercaya (*opinion leader*) yang bernama Rio Andri untuk menyampaikan surat pembatalan pembangunan Bednungan Rokan Kiri (3) pendekatan secara persuasif baik kepada *opinion leader* ataupun masyarakat secara umum dengan tujuan agar surat pembatalan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat(4) proses evaluasi dan pemerintah daerah Rokan Hulu tidak melakukan proses ini dalam stratedgi komunikasi nya.

Kata Kunci: Strategi komunikasi pemerintah.

ABSTRACT

COMMUNICATION OF THE REGIONAL GOVERNMENT POLICY OF ROKAN HULU DISTRICT CONCERNING CANCELLATION OF THE LEFT ROKAN DAM IN KECAMATAN ROKAN IV KOTO

Widia Astuti

179110161

The problem in this study is to see how the communication strategy of the Rohul local government policy regarding the cancellation of the Rokan Kiri Dam construction in Rokan IV Koto District. This study uses the concept of a communication strategy consisting of communication planning, communication management, approach and evaluation process that refers to the concept of an opinion leader. Qualitative descriptive research methods with a qualitative approach have been used on informants by means of interviews and documentation. The results showed that the communication strategy carried out by the Rohul local government in conveying letters to the community was (1) planning communication by conducting deliberation with representatives of community leaders, customs, youth leaders, in issuing a letter of cancellation of the construction of the Rokan Kiri Dam (2) Management communication by choosing a trusted person (opinion leader) named Rio Andri to submit a letter of cancellation of the development of Bednungan Rokan Kiri (3) a persuasive approach to both opinion leaders and the general public with the aim that the cancellation letter is conveyed properly to the public (4) evaluation process and the local government of Rokan Hulu does not carry out this process in its communications strategy.

Keywords: *Government communication strategy.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Menurut Sedarmayanti (2018: 30) Pemerintahan merupakan organisasi yang memiliki hak untuk melaksanakan kewenangan berdaulat atau tertinggi. Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan tertinggi menurut Undang-Undang Dasar. Secara luas pemerintahan juga dapat diartikan sebagai aktivitas pemerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Kebijakan adalah sesuatu hal yang ingin dilakukan oleh seseorang ataupun lembaga pemerintahan dalam sesuatu hal. Menurut Werf (1997) Kebijakan pemerintah adalah sebuah keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan sistem administrasi Negara Republik Indonesia. Suatu wilayah atau daerah bisa maju, aman, damai, sejahtera tergantung kepada kebijakan pemerintahnya.

Menurut Sedarmayanti (2018: 33) Tugas pokok pemerintah ada empat yaitu:

- a. Keamanan yaitu menjaga segala kemungkinan serangan dari luar maupun dari dalam.
- b. Ketertiban yaitu mencegah terjadinya konflik diantara warga masyarakat dan menjamin berlansungnya perubahan dan perkembangan secara damai.

- c. Keadilan yaitu diwujudkan melalui keputusan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- d. Kesejahteraan sosial yaitu pemerintah membantu orang - orang kurang mampu, cacat dan anak terlantar.

Dalam hal ini pemerintah Daerah sangat penting untuk mengkomunikasikan secara baik kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah dalam pembangunan Bendungan Rokan Kiri. Komunikasi yang baik diharapkan supaya masyarakat paham untuk apa Bendungan Rokan Kiri dibangun, apa saja manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat setelah adanya pembangunan Bendungan Rokan Kiri, tujuannya dengan adanya pemerintah mengkomunikasikan kepada masyarakat juga dapat menghindari kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah daerah, kemudian dengan adanya komunikasi pemerintah juga dapat menarik dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dari pembangunan Bendungan Rokan Kiri tersebut.

Komunikasi pemerintah dalam pembangunan Bendungan Rokan Kiri dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya yaitu, dengan cara mengundang aparat pemerintahan, mulai dari pemerintah Kecamatan, Desa, tokoh adat, dan orang-orang yang disegani dari masyarakat yang akan terkena dampak negatif dari pembangunan Bendungan Rokan kiri. Setelah mengundang orang-orang tersebut pemerintah bisa melakukan musyawarah untuk menyatukan persepsi antara pemerintah dan masyarakat yang terdampak. Apabila hal tersebut berhasil dilakukan maka masyarakat akan mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebagaimana intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang komunikasi publik membutuhkan kerjasama strategi dengan berbagai elemen komunikasi dan kehumasan pemerintahan. Hal tersebut bertujuan untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan juga sebagai untuk mengakomodasikan respon dan masukan dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Komunikasi yang efektif diharapkan dapat menghasilkan respon positif berupa tindakan dari masyarakat yang mendukung kebijakan pemerintah.

Pengertian komunikasi pemerintah menurut beberapa ahli diantaranya adalah:

- a. Hasan (2005:95) komunikasi pemerintah adalah penyampain ide dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam mencapai tujuan Negara.
- b. Menurut Lely Arrianie (2010:14) komunikasi pemerintah sama dengan komunikasi politik yaitu penyampaian pesan yang disusun secara sengaja untuk mendapatkan pengaruh atas penyebaran atau penggunaan *power* kepada masyarakat.
- c. Ulbert Silalahi (2004: 34) komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi antar manusia (*human communication*) yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan.
- d. Taliziduhu Ndraha (2015:104) Komunikasi pemerintah dapat dianalogikan dengan komunikasi antara produser dengan konsumen yang terjadi pada semua *level* (*multilevel*) dan menggunakan berbagai media (*multimedia*).

Arti dari komunikasi pemerintah disini adalah pemerintah dapat diasumsikan sebagai penyampai pesan dan masyarakat sebagai penerima pesan, akan tetapi posisi ini bisa saja berbalik, masyarakat juga dapat menyampaikan ide atau gagasan dan pemerintah juga harus bisa memahami dan menerima pendapat yang disampaikan oleh masyarakat. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan sekaligus bertanggung jawab untuk mempertimbangkan apa yang diinginkan masyarakat sebenarnya. Pemerintah yang baik akan lebih mementingkan kesejahteraan rakyatnya.

Pengertian komunikasi kebijakan pemerintah menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Achmad S. Ruky komunikasi adalah proses pemindahan dan pertukaran pesan, dimana pesan dapat berbentuk fakta, gagasan, perasaan, data atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Proses ini dilakukan untuk mempengaruhi atau mengubah informasi yang dimiliki serta tingkah laku orang yang menerima pesan tersebut.
- b. Menurut Hafied Canggara (2015:25) komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi pengetahuan dan perilaku seseorang.
- c. Menurut Anwar Arifin komunikasi adalah sebuah konsep multi makna. Dalam makna sosial, komunikasi merupakan proses sosial yang berkaitan dengan kegiatan manusia dan kaitannya dengan pesan dan perilaku.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi (pemerintahan) dalam menangani suatu permasalahan yang terjadi di sebuah daerah. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di daerah dan tentunya untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Kebijakan pemerintah sangat penting dikomunikasikan sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Anshar Suherman & Areif Sijajudin (2018) yang mengatakan bahwa, pembangunan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan menumbuhkan rasa saling percaya sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan harmonisasi pemerintah daerah dapat terjaga baik antara pemerintah dengan masyarakat, maupun antara kelompok masyarakat di daerah, keadaan tersebut merupakan syarat utama untuk keberlangsungan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Museng (2017) mengatakan bahwa problematika komunikasi yang sering terjadi dalam pemerintah daerah adalah mengenai masalah transparansi kerja, anggaran dan kebijakan komunikasi. Sehingga hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya, tentu saja akan menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Pada periode pertama Presiden Joko Widodo tahun 2014-2019 pemerintah Indonesia telah menjadikan pembangunan infrastruktur secara merata sebagai fokus agenda. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan

untuk rakyat Indonesia. Tahun 2019 anggaran biaya infrastruktur mencapai Rp 420 triliun. Angka ini meningkat secara drastis sebesar 157% dari tahun 2014 yang hanya Rp 163 triliun. Anggaran biaya yang besar tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur seperti: jalan, jembatan, rumah susun, bendungan, jalan tol, perumahan, sistem penyediaan air minum, irigasi, pembangunan pos lintas batas Negara dan masih banyak lagi infrastruktur yang lainnya yang ingin dibangun (Iswari Anggit Pramesti, ,14 Februari 2019 CBNC Indonesia).

Pembangunan infrastruktur diatas tersebar diseluruh Provinsi di Indonesia, tidak terkecuali dengan Provinsi Riau. Provinsi Riau merupakan Provinsi yang terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota. Pembangunan di Provinsi Riau cukup pesat, salah satu yang merasakan dampak dari pembangunan yang begitu pesat adalah Kabupaten Rokan Hulu atau yang sering disebut juga dengan Negeri Seribu Suluk. Kecamatan Rokan IV Koto merupakan bagian dari Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di perbatasan antara Provinsi Riau dan Provinsi Sumatra Barat.

Masyarakat di Kecamatan Rokan IV Koto dihadapkan pada satu permasalahan Pro dan Kontra terhadap pembangunan Bendungan berskala nasional, yaitu Bendungan Rokan Kiri. Bendungan adalah sebuah kontruksi yang dibangun untuk menahan lajunya air, menjadi danau, waduk, atau tempat rekreasi. Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2007 tentang proyek satrategis Nasional, pembangunan Bendungan Rokan Kiri termasuk salah satu Proyek Strategis Nasional guna memenuhi kebutuhan debit air untuk irigasi, air bersih dan sumber listrik.

Apabila Bendungan Rokan Kiri jadi dibangun otomatis akan mensejahterkan masyarakat di sekeliling nya. Sebenarnya Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik itu tingkat nasional maupun tingkat daerah tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Disinilah peran pemerintah perlu ditingkatkan supaya apa yang menjadi kebijakannya didukung oleh masyarakat.

Pembangunan Bendungan Rokan Kiri memakan biaya yang cukup besar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.1 Data Bendungan Rokan Kiri

Nama Proyek	Bendungan Rokan Kiri
Investasi Total	2600 Milyar
Sumber APBN – APBD	APBN
Sumber Swasta	-
Sumber Belum Ditentukan	-
Skema Pendanaan	-
Lokasi	Rokan Hulu, Riau
Penanggung Jawab Proyek	Kementrian PURR
Rencana Mulai Konstruksi	2019
Recana Mulai Operasional	2023
Status Terakhir	Penyiapan

Sumber data: kkip.go id

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui nama proyek yang akan dibangun adalah Bendungan Rokan Kiri, investasi total yang dibutuhkan sebesar 2600 Milyar, dana yang digunakan untuk membangun Bendungan Rokan Kiri adalah dari anggaran pendaptan belanja Negara (APBN), lokasi pembangunan Bendungan Rokan Kiri berada di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dalam pembangunan Bendungan Rokan Kiri ini yang bertanggung jawab atas pembangunan proyek adalah kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PURR), rencana awal proyek Bendungan Rokan Kiri ini dibangun dan pada tahun 2023 sudah mulai beroperasi, status terakhir

dari proyek pembangunan Bendungan Rokan Kiri ini masih dalam tahap penyiapan.

Pemerintah juga mempunyai peran salah satunya adalah untuk menyelesaikan konflik yang menyangkut kepentingan masyarakat, salah satu contohnya adalah permasalahan yang terjadi pada masyarakat Rokan Hulu tentang pembangunan Bendungan Rokan Kiri. Pembangunan Bendungan Rokan Kiri ini merupakan salah satu program pemerintah yang seharusnya dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan Bendungan ini, baik yang terkena dampak positif maupun dampak negatifnya. Komunikasi ini diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pembangunan Bendungan Rokan Kiri.

Seperti yang disampaikan oleh Keith Butterick (2014: 77) bahwa dalam sebuah program yang terpetakan dengan jelas akan tertera daftar tindakan yang perlu diambil beserta waktu pelaksanaannya, dijelaskan bahwa kejadian penting pasca peristiwa, dan tindakan apa saja yang sebaiknya diambil dan kapan waktunya.

Pembangunan Bendungan Rokan Kiri di Kecamatan Rokan IV Koto ini telah menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat setempat. Apabila Bendungan Rokan Kiri ini dibangun akan menenggelamkan empat Desa diataranya adalah Desa Cipang Kanan, Desa Cipang Kiri Hulu, Cipang Kiri Hilir dan Desa Tibawan.

Berdasarkan wawancara awal melalui telepon seluler pada tanggal 24 September 2020 Abadi (44th) sebagai Kepala Desa Cipang Kanan mengatakan bahwa:

“alasan 4 Desa indo ondak lai nyo pembangunan Bendungan Rokan Kiri karena akan monnggolomkan warga atau masyarakat kurang lobiah 15000 urang, dan juo dapek monghilangkan kearifan lokal, adet istiadet, tompek sejarah, pencaharian masyarakat disiko”.

Dari pernyataan kepala Desa Cipang kanan diatas ia menjelaskan bahwa alasan dari empat Desa menolak pembangunan Bendungan Rokan Kiri karena akan menenggelamkan tempat tinggal bagi warga lebih kurang 15000 jiwa, menghilangkan kearifan lokal situs sejarah, tradisi. budaya, serta mata pencaharian pada masyarakat setempat.

Berdasarkan wawancara awal melalui telpon seluler pada tanggal 26 September 2020 Rio Andri (25 tahun) sebagai Koordinator lapangan dalam aksi demonstrasi pembatalan Bendungan Rokan Kiri menjelaskan bahwa:

“alasan penolakan yang dilakukan oleh empat Desa ini dibuktikan dengan adanya aksi yang dilakukan dari gabungan dari masyarakat, mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama. Tujuan dari aksi tersebut adalah untuk meminta agar Bupati Rokan Hulu mengeluarkan surat pernyataan tertulis terhadap penolakan pembangunan Bendungan Rokan Kiri”

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sudah mencoba mengkomunikasikan pembangunan Bendungan Rokan Kiri dengan masyarakat Cipang raya. Pemerintah akan bertanggung jawab atas kerugian kawasan yang terkena dampak genangan yakni seluas 4.000 ha, Bupati Rokan Hulu juga telah mengkomunikasikan alasan dan manfaat Bendungan Rokan Kiri dibangun, akan tetapi masyarakat Cipang Raya tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan

oleh Bupati Rokan Hulu, sehingga terjadilah keributan antara masyarakat Cipang Raya dengan aparat kepolisian (Mhd Akhwan, 23 April 2018, Riau Pos).

Karena terjadinya penolakan oleh masyarakat Cipang Raya, kemudian pemerintah melakukan pertimbangan sehingga pembangunan Bendungan Rokan Kiri dibatalkan. Hal ini dapat dilihat dengan surat dibawah ini.

Gambar 1.1 surat penolakan pembangunan Bendungan Rokan Kiri yang dikeluarkan oleh Bupati Rokan Hulu.



Dokumentasi: Rio Andri (10 September 2020).

Tidak hanya sampai disitu masyarakat empat Desa itu atau yang sering disebut juga masyarakat Cipang Raya juga melanjutkan aksinya dengan melakukan demonstrasi di depan kantor Gubernur Provinsi Riau (23/04/2018), tujuan demonstrasi dilakukan sama seperti aksi sebelumnya yaitu untuk meminta surat tertulis yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Riau. Sama halnya

dengan alasan Bupati Rokan Hulu untuk mengeluarkan kebijakan surat pembatalan Pembangunan Bendungan Rokan Kiri yaitu karena warga yang tergabung dalam aksi juga banyak dan sebelum surat pembatalan itu dikeluarkan mereka akan terus melakukan aksi demo. Dengan perjuangan yang cukup panjang masyarakat Cipang Raya akhirnya mendapatkan surat tertulis sementara tentang penolakan pembangunan Bendungan Rokan Kiri.

Pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk mengeluarkan kebijakan berupa surat pembatalan yang akan diteruskan ke pemerintah pusat adalah karena banyaknya warga masyarakat Cipang Raya yang tergabung dalam aksi tersebut dan apabila pemerintah Daerah Provinsi Riau tidak mau mengeluarkan kebijakan melalui surat pembatalan, warga mengancam tidak akan pergi dan akan tetap melakukan aksi Demonstrasi di depan kantor Gubernur Provinsi Riau. Dengan berbagai pertimbangan diatas pemerintah Daerah Provinsi Riau akhirnya mengeluarkan kebijakan berupa surat pembatalan pembangunan Bendungan Rokan Kiri di Kecamatan rokan IV Koto.

Gambar 1.2 surat penolakan pembangunan Bendungan Rokan Kiri yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau .



Dokumentasi: Rio Andri (10 September 2020)

Pemerintah berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut mengenai kepentingan masyarakat, salah satu contohnya adalah mengenai pembangunan Bendungan Rokan Kiri. Dengan diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, setiap pemerintah daerah dituntut untuk siap menerima delegasi wewenang dari pemerintah pusat atau perintah di atasnya, tidak hanya dalam hal penyelenggaraan pemerintahannya, tetapi juga dalam hal pemecahan permasalahan dan pendanaan kegiatan pembangunannya.

Berdasarkan hasil wawancara awal melalui telepon seluler pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan Rio Andri (25th) koordinator lapangan dalam aksi demonstrasi pembatalan Bendungan Rokan Kiri mengatakan bahwa:

“ Dari jumlah keseluruhan masyarakat Cipang Raya yang terkena dampak dari pembangunan Bendungan Rokan Kiri 80% sudah mengetahui bahwa pembangunan Bendungan Rokan Kiri batal dibangun, akan tetapi 20% masyarakat nya belum mengetahui pembangunan Bendungan Rokan Kiri batal dibangun. Kebanyakan masyarakat Cipang Raya mengetahui pembatalan pembangunan Bendungan Rokan Kiri dari mulut ke mulut bukan berdasarkan kedua surat yang telah dikeluarkan oleh sekretaris daerah provinsi Riau dan Bupati Rokan Hulu. Oleh karena itu perlu adanya peran pemerintah daerah mengkomunikasikan kepada masyarakat Cipang Raya bahwa dari tingkat daerah Kabupaten Rokan Hulu dan tingkat Provinsi Riau bahwa pembangunan Bendungan sudah dibatalkan”

Permasalahan utama dari latar belakang berangkat dari permasalahan diatas adalah adanya kebijakan-kebijakan pemerintah Negara yang mendapat pertentangan dari masyarakat terkait pembangunan Bendungan Rokan Kiri di Kecamatan Rokan IV Koto. Dalam konteks komunikasi tentunya kejadian ini diduga adanya proses komunikasi atau proses penyampaian pesan yang tidak dipahami oleh masyarakat Cipang raya. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Komunikasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tentang Pembatalan Pembangunan Bendungan Rokan Kiri Di Kecamatan Rokan IV Koto”**.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas ,maka penulis dapat identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Program pemerintah dalam membangun Bendungan Rokan Kiri Kecamatan Rokan IV Koto, membawa dampak bagi masyarakat.
2. Timbulnya pro dan kontra terkait pembangunan Bendungan Rokan Kiri di Kecamatan Rokan IV Koto.
3. Kebijakan pemerintah terkait surat pembatalan Bendungan Rokan Kiri tidak tersampaikan dengan baik.
4. UU No 32 sebagai pedoman masyarakat dan pemerintah dalam mengupayakan penyelesaian pembangunan Bendungan Rokan Kiri di Kecamatan Rokan IV Koto.

C. Fokus penelitian

Penelitian ini berfokus pada Komunikasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tentang Pembatalan Pembangunan Bendungan Rokan Kiri Di Kecamatan Rokan IV Koto.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,maka dapat penulis rumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Komunikasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tentang Pembatalan Pembangunan Bendungan Rokan Kiri Di Kecamatan Rokan IV Koto?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat penulis rumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Komunikasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tentang Pembatalan Pembangunan Bendungan Rokan Kiri Di Kecamatan Rokan IV Koto.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian informasi dan kajian ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya dan juga dapat menambah kajian literature sebagai sumber penulisan ilmu komunikasi khususnya dibidang komunikasi kebijakan pemerintah.

b. Manfaat praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi peneliti khususnya tentang komunikasi kebijakan pemerintah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Komunikasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tentang Pembatalan Pembangunan Bendungan Rokan Kiri Di Kecamatan Rokan IV Koto.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

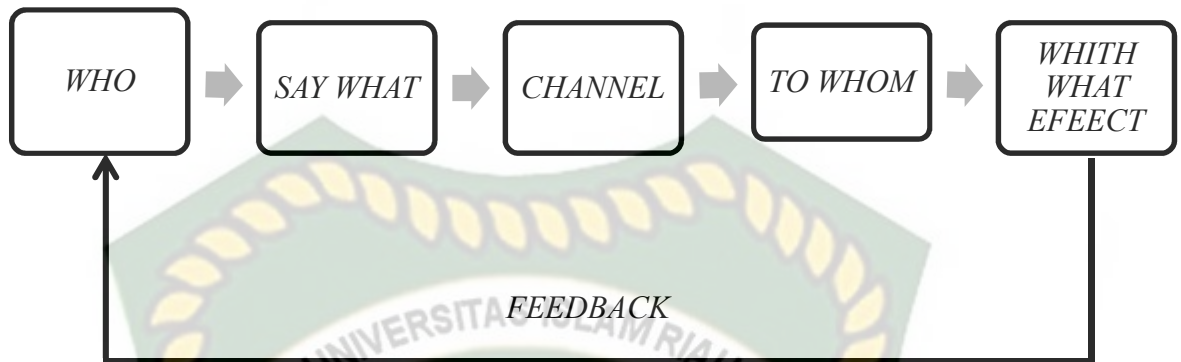
A. Kajian Literatur

1. Komunikasi

Komunikasi berasal dari Bahasa latin “*communicatio*” bersumber dari perkataan “*Comunis*” berarti sama. Dalam sebuah organisasi (pemerintahan) biasanya komunikasi selalu menekankan pentingnya sebuah komunikasi untuk menghindari terjadinya kesalah paham. Pengertian komunikasi menurut beberapa ahli:

- a. Menurut Achmad S. Ruky komunikasi adalah proses pemindahan dan pertukaran pesan, dimana pesan dapat berbentuk fakta, gagasan, perasaan, data atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Proses ini dilakukan untuk mempengaruhi atau mengubah informasi yang dimiliki serta tingkah laku orang yang menerima pesan tersebut.
- b. Menurut Hafied Canggara (2015:25) komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi pengetahuan dan perilaku seseorang.
- c. Menurut Anwar Arifin komunikasi adalah sebuah konsep multi makna. Dalam makna sosial, komunikasi merupakan proses sosial yang berkaitan dengan kegiatan manusia dan kaitannya dengan pesan dan perilaku.

Salah satu model komunikasi yang berpengaruh adalah model komunikasi Harold Laswell :



Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa “*who say what in which channel to whom with what effect*” maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah siapa yang mengatakan apa kepada siapa pesan melalui saluran-saluran tertentu, baik secara langsung atau tidak langsung dan dari pesan yang disampaikan menimbulkan efek berupa umpan balik.

Menurut May Rudy (2005:4-5) Komunikasi memiliki beberapa unsur diantaranya adalah:

- a. Komunikator (pengirim pesan) adalah seseorang atau sekelompok orang yang merupakan tempat asal pesan, berita atau informasi.
- b. Pesan atau berita (*message*) adalah pesan-pesan atau informasi yang disampaikan kepada komunikan melalui penggunaan bahasa atau lambang-lambang , tulisan, warna, ataupun informasi yang disampaikan secara langsung.

- c. Saluran atau media komunikasi adalah sarana tempat pesan disampaikan kepada penerima pesan, misalnya *hanphone*, TV, surat kabar, radio, spanduk, dan media komunikasi lainnya.
- d. Komunikan (penerima pesan) adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek yang dituju oleh komunikator yang menerima pesan atau informasi yang disampaikan.
- e. Efek (*effect*) atau umpan balik (*feedback*) adalah hasil penerimaan pesan atau informasi oleh komunikan, pengaruh atau kesan yang timbul setelah komunikan menerima pesan.

Seperti yang disampaikan, Hafied Canggara (2015:34-39) Komunikasi dibagi dalam 4 tipe yaitu yang pertama:

- a. Komunikasi dengan diri sendiri (*intrapersonal Communication*) yaitu proses komunikasi didalam diri sendiri, proses komunikasi ini terjadi karena adanya orang yang memberi arti terhadap sesuatu objek yang diamatinya atau terbesik dalam pemikirannya.
- b. Komunikasi antarpribadi (*interpersonal communication*) yaitu proses komunikasi antara dua orang atau lebih dan juga komunikasi ini dapat dilakukan dengan tiga bentuk, yakni percakapan, dialog dan wawancara.
- c. Komunikasi publik (*public communication*) yaitu proses komunikasi dimana pesan pesan yang disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka didepan khalayak ramai.
- d. Komunikasi massa(*mass communication*) yaitu proses komunikasi yang berlangsung dimana pesan yang dikirim dari sumber yang melembaga

kepada khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat kabar dan film.

2. Kebijakan Pemerintah Daerah

Konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *policy* yang berarti kebijakan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut Carl J. Frederick kebijakan sebagai rangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, sekelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dari pendapat ini juga dapat disimpulkan bahwa ide kebijakan melibatkan tingkah laku yang menunjukkan apa yang sesungguhnya dilakukan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Pemerintahan menurut Talizudhu Ndraha (2015:344) adalah proses pemenuhan dan perlindungan tuntutan yang diperintah oleh rakyat terhadap jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan *civil* tempat pada saat yang diperlukan oleh yang bersangkutan. Lembaga yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan ialah pemerintahan.

Jadi kebijakan pemerintah daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang mempunyai tujuan tertentu yang dilaksanakan dalam menangani masalah tertentu yang terjadi didalam daerahnya. Kebijakan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi baik dilingkungan masyarakat maupun didalam pemerintahan itu sendiri.

Kebijakan pemerintah muncul karena adanya kebutuhan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi didalam masyarakat. Kebijakan pemerintah difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan sebelumnya. Sehingga kebijakan dapat dimaknai dengan tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun oleh kelompok pemerintahan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Pelaksanaan dari kebijakan merupakan hal yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil dari evaluasi dari pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan atau dampak yang tidak diharapkan.

Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan progam dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran melaikan juga untuk menyangkut jaringan pada kepentingan jaringann pada kekuatan-kekuatan, ekonomi, politik dan sosial yang secara lansung maupun tidak lansung yang dapat mempengaruhi perilaku dari pihak yang terlibat. Kesalahan atau

ketidaksempurnaan kebijakan biasanya dapat dievaluasi setelah kebijakan itu dilaksanakan, sesuai atau tidaknya dengan keinginan masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan kebijakan pemerintah biasanya menggunakan proses sosialisasi sebagai penyebaran informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu sosialisasi harus terintegrasi dalam aktivitas pemberdayaan dan dilakukan secara terus menerus agar dapat mengatasi masalah-masalah secara berkesinambungan. Sosialisasi kebijakan dapat diharapkan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat sasaran, dengan demikian dapat membangun partisipasi masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Menurut Budi Winarno (2007) tahapan yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yaitu:

- a. Penyusunan agenda adalah sebuah tahap yang strategis dalam realitas kebijakan publik. Penyusunan agenda kebijakan harus berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan dan melibatkan orang-orang yang terlibat didalam kebijakan tersebut.
- b. Formulasi kebijakan dimana masalah yang masuk dalam agenda kebijakan dibahas untuk oleh para pembuat kebijakan. Kemudian masalah tersebut dicari pemecahan masalah untuk menacari jalan yang terbaik.
- c. Adopsi kebijakan adalah memberikan otoritas terhadap proses dasar pemerintahan. Dimana masyarakat akan mematuhi kedaulatan yang diatur oleh pemerintahan.

- d. Implementasi kebijakan dalam hal ini dapat diketahui bahwa kebijakan yang dilaksanakan sudah menacapai tujuan atau tidak.
- e. Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak dari kebijakan yang dilaksanakan.

Pemerintah daerah berdasarkan UU. No. 23 Tahun 2014 adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah menjadi kewenangan otonomi daerah. Pemerintah daerah meliputi, Gubernur, Bupati ataupun perangkat daerah yang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah sebagai pelaksanaan pemerintah menjalankan, mengatur jalannya pemerintahan. Oleh karena itu pemerintah memiliki dua peran dan tugas sebagai wakil pemerintah daerah sebagai berikut adalah:

- a. Desentralisasi yaitu pemerintah bertugas untuk melaksanakan semua urusan kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur segala urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi yaitu pemerintah menerima pelimpahan wewenang oleh pemerintah Gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada badan - badan vertikal diwilayah tertentu untuk dilaksanakan.
- c. Tugas pembantu yaitu menjalankan semua tugas dari pemerintah Provinsi kepada daerah, serta dari pemerintah Kabupaten ke Desa untuk menjalankan tugas tertentu.

Menurut Suwari (2017:7) yang menjadi kriteria kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten atau Kota.
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah Kabupaten atau Kota.
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat dan dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten atau Kota.
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya apabila dilakukan oleh Kabupaten atau Kota.

Menurut Undang- Undang 32 tahun 2004 prinsip- prinsip ekonomi Daerah diantaranya sebagai berikut:

- a. Prinsip otonomi daerah adalah otonomi seluas-luasnya dan kepada Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
- b. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran, yang bertujuan untuk mensejahterkan rakyat.
- c. Melaksanakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
- d. Penyelenggaraan otonomi Daerah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan memperhatikan kepentingan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

- e. Penyelenggaraan otonomi Daerah harus menjamin keserasian dengan daerah lainya.

Melihat prinsip-prinsip dan kewenangan pemerintah daerah diatas sangat kompleks maka kewenangan-kewenangan tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja pemerintah Daerah, misalnya melalui belanja pembiayaan Daerah, pembangunan infrastruktur Daerah pemerintahan yang transparan, adil dan taat terhadap Undang-Undang. Pemerintah Daerah mempunyai hak dan wewenang terhadap apa yang ingin dia lakukan terhadap Daerah nya sendiri, Maka dari itu perkembangan suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh kinerja pemerintahannya.

3. Komunikasi Pemerintah Daerah

Secara etimologis kata pemerintahan berasal dari kata *pemerintah*, berasal dari kata *perintah* yang berarti menyuruh melakukan suatu pekerjaan (Pamuji, 1985:22) dalam Sedarmayanti. Tinjauan asal kata pemrintah berasal dari bahasa inggris *Government* yang berarti pemerintah dalam banyak tulisan, ada yang berpendapat bahwa *government* tidak selalu memiliki makna pemerintahan, Samuel Edward Finer mengartikan *government* sebagai *public servent*, yakni pelayanan kesimpulan kata *government* berarti:

- a. Menunjukkan kegiatan atau proses pemerintah dan melakukan kontrol atas pihak lain.
- b. Menunjukkan pada masalah -masalah Negara dalam kegiatan proses yang dijumpai.

- c. Menunjukkan cara, metode atau sistem dimana suatu masyarakat tertentu diperintah.

Keberadaan pemerintah merupakan salah satu dari tiga unsur berdirinya sebuah Negara. Organisasi pemerintah dipercayai untuk menjalankan pemerintahan yang berguna untuk melayani kepentingan rakyat yang merupakan salah satu tugas pokoknya. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah tidak lepas yang namanya harus berinteraksi atau berkomunikasi baik dalam organisasi pemerintahan maupun dengan masyarakat luas. Pengertian komunikasi pemerintah menurut beberapa ahli:

- a. Yohanes (2018: 59) Komunikasi pemerintah adalah proses berbagai informasi, ide, gagasan atau perasaan, dan sikap antara aparatur pemerintah untuk internal organisasi dan eksternal organisasi atau sebaliknya dalam organisasi pemerintahan, jaringan komunikasi lebih cenderung kaku.
- b. Menurut Hasan (2005:95) komunikasi pemerintah adalah penyampain ide dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam mencapai tujuan Negara. Komunikasi dalam oragisasi pemerintah daerah dibagi dalam dua tipe yaitu komunikasi inernal dan eksternal.
- c. Menurut Lely Arrianie (2010:14) komunikasi pemerintah sama dengan komunikasi politik yaitu penyampaian pesan yang disusun secara sengaja untuk mendapatkan pengaruh atas penyebaran atau penggunaan *power* kepada masyarakat.

Setelah memahami komunikasi dan pemerintah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Proses penyampaian ide, perasaan, gagasan kepada berbagai pihak yang terkait dengan aktivitas pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Sebuah proses mengirim ide, gagasan, pikiran yang berguna untuk menyatukan pemikiran, dalam proses interaksi dalam rangka melaksanakan tugas pokok pemerintahan Negara.
- c. Tujuan komunikasi pemerintah pada dasarnya adalah untuk mencapai tujuan bersama antara komunikator dan komunikan dalam urusan pemerintahan.

Komunikasi pemerintah mempunyai pengaruh terhadap sasaran, tipe, dan tugas pemerintah termasuk dalam menjalin hubungan dengan pihak lain. Tanpa adanya sarana dan fasilitas hubungan komunikasi kesegala arah dalam situasi tertentu sulit untuk dicapai. Komunikasi bagi pemerintah bukan saja sebagai alat untuk menyampaikan informasi tetapi juga sebagai alat untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam masalah tertentu.

Menurut Sedarmayanti (2018:183-184) komunikasi pemerintah dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Komunikasi formal adalah komunikasi antara bawahan dengan atasan ataupun sebaliknya. Komunikasi formal mengikuti atasan berdasarkan hierarki otoritas organisasi. Ciri-ciri lain dari komunikasi formal adalah pesan yang disampaikan resmi, termasuk pengarahan yang diberikan oleh

atasan yang berupa prosedur, arahan, keputusan, kebijakan, intruksi dan lain sebagainya.

- b. Komunikasi informal ialah pada umumnya tidak mengikuti jalur hiarki organisasi dan otoritas, komunikasi informal sering melangkahi komunikasi formal maksudnya adalah dalam komunikasi ini bnyak terdapat perbedaan latar belakang antra penerima pesan dan pengirim pesan yang dapat menyebabkan proses komunikasi terganggu.

Untuk menciptakan komunikasi pemerintahan yang efektif perlu diperhatikan sebagai berikut:

- a. Mengadakan tindakan langsung.
- b. Mengatur arus informasi.
- c. Memanfaatkan umpan balik.
- d. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
- e. Saling percaya.

Bagaimanapun juga organisasi pemerintahan tidak akan melaksanakan fungsinya dan mencapai tujuannya tanpa adanya komunikasi pemerintah yang baik. Keberhasilan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tergantung pada proses komunikasinya, baik komunikasi dengan pihak internal maupun dengan pihak eksternal. Melalui komunikasi, eksekutif pemerintah mempengaruhi sikap (*attitude*), pemahaman (*understanding*), dan perilaku (*behavior*) birokrasi dan masyarakat (Yohanes Museng, 2018). Dalam proses komunikasi organisasi pemerintah, seperti penerimaan pesan, pemahaman terhadap pesan dan bagaimana pesan tersampaikan dengan baik. Arus penyampaian pesan dilakukan

melalui jaringan yang sifatnya saling memiliki hubungan satu sama yang lain. Pesan yang disampaikan bukan hanya berupa pesan - pesan melainkan juga berupa ide- ide, perencanaan yang berhubungan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikian tiap orang terlibat penyelenggaraan pemerintah demokratis merupakan bagian dari proses komunikasi yang baik.

Komunikasi pemerintah diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan semua pihak. Dalam mengeluarkan kebijakannya pemerintah harus mengkomunikasikan terlebih dahulu, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah. Apabila hal tersebut telah berhasil dilakukan maka tidak akan ada masalah antara pemerintah dan masyarakat.

4. Teori Pemuka Pendapat (*Opinion Leader*)

Istilah “*opinion leader*” pertamakali dikemukakan oleh Paul Lazarsfeld (1940), ia mengatakan bahwa seorang tidak langsung menerima dan percaya apa yang disampaikan oleh media massa tetapi mereka menerima informasi tersebut ketika disampaikan oleh orang yang mereka percaya, orang-orang inilah yang disebut sebagai “*opinion leader*”. teori ini adalah salah satu dari beberapa model yang mencoba menjelaskan difusi inovasi, ide, atau produk komersial. Pemuka pendapat (*opinion leader*) adalah agen yang merupakan pengguna aktif dan media yang menafsirkan makna pesan media atau konten media yang lebih rendah bagi pengguna akhir. Pendapat pemimpin ini cenderung spesifik subjek, yaitu orang yang merupakan pemuka pendapat dalam satu bidang mungkin menjadi

follower/penerima di dalam bidang lain. Melalui informasi dari merekalah kadang perkembangan terkini lingkungan sekitarnya dan dunia pada umumnya, diketahui masyarakat. Ini berarti, mereka secara tidak langsung menjadi perantara pesan berbagai informasi yang diterima olehnya kemudian diteruskan kepada masyarakat.

Pihak yang sering terkena media *exposure* (terpaan) di masyarakat desa kadang diperankan oleh pemuka pendapat. Mereka ini sangat dipercaya di samping juga menjadi panutan, tempat bertanya dan meminta nasihat bagi anggota kelompok dan masyarakatnya. Menurut Haidir Fitra Siagian (2013) Ada dua pengelompokan pemuka pendapat berdasarkan aktif tidaknya dalam perilaku;

- a. pemuka pendapat aktif (*opinion giving*) adalah ketika ia aktif mencari penerima atau followers untuk mengumumkan suatu informasi. Dimana seseorang mencari informasi dan meneruskannya kepada masyarakat. Ini sangat baik, karena tingkat kepercayaan kepadanya sangat tinggi, mengingat banyak masyarakat yang belum memahami suatu permasalahan. Kelebihan dengan cara ini adalah tingkat kepercayaan terhadap pemuka pendapat sudah terbangun terlebih dahulu.
- b. pemuka pendapat pasif (*opinion seeking*) artinya pemuka pendapat dicari oleh followers-nya, dalam hal ini penerima aktif mencari sumber informasi kepada pemuka pendapat sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Jika followers yang aktif maka dikategorikan sebagai *opinion seeking*, sedangkan jika pemuka pendapatnya yang aktif disebut sebagai *opinion giving*.

Keberadaan para pemuka pendapat sangat terkait dengan budaya politik yang berlaku dalam masyarakat. Ada perbedaan penerimaan terhadap pemuka pendapat antara satu daerah dengan daerah lain. Jika suatu masyarakat yang masih memegang teguh budaya-budaya lokal, tingkat pengamalan ajaran agama yang masih kental, maka keberadaan pemuka pendapat (*opinion leader*) masih relevan, karena sesuai dengan budaya politik setempat.

Dalam kajian ilmu komunikasi, dikenal adanya teori yang disebut sebagai; *two-step flow of communication theory* (aliran komunikasi bertahap ganda). Teori ini memandang bahwa karena berbagai keterbatasan dan permasalahan yang cukup kompleks, maka suatu informasi yang disampaikan (*message*) tidak tertuju langsung kepada seluruh *audiens* (khalayak). Meskipun banyak khalayak yang mendengar informasi itu, namun banyak juga yang tidak memahaminya. Sedangkan orang yang tidak langsung mendengar, tentu lebih banyak yang belum memahaminya, karena mungkin saja terjadi *noise* (gangguan) yang dapat menghalangi proses penyampaian informasi.

Dalam hal inilah, informasi itu akan terlebih dahulu dicerna dan dimaknai oleh pemuka pendapat (*opinion leader*), kemudian akan melanjutkan informasi tersebut kepada khalayak. Di sinilah peran yang sangat besar dari seorang pemuka pendapat (*opinion leader*). Seorang pemuka pendapat memiliki keleluasaan untuk menerjemahkan informasi yang dimilikinya. Ke mana arah informasi itu akan diberikan, sepenuhnya menjadi kewenangan pemuka pendapat. Dalam hal ini masyarakat Indonesia pada umumnya sangat mempercayai seorang pemuka pendapat, karena ia memiliki kelebihan dalam berbagai hal. Misalnya dalam

bidang keagamaan, ilmu pengetahuan, keberanian, harta kekayaan, keturunan, keahlian tertentu, dan sebagainya.

Pemuka pendapat memiliki kemahiran atau kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh anggotanya, pemuka pendapat juga mempunyai wawasan luas dan mengetahui berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Para pemuka pendapat (*opinion leader*) dapat dibedakan dari orang lain dengan tiga kriteria: "siapa dia", personifikasi dari nilai-nilai tertentu; "Apa yang dia ketahui", kompetensinya dan "siapa yang dia kenal". Sementara untuk melakukan pengukuran kapasitas kepemimpinan pendapat menarik perhatian dalam berbagai penyelidikan.

Untuk mengenali siapa pemuka pendapat (*opinion leader*) boleh dengan menggunakan analisis rangkaian sosial. Analisis rangkaian sosial mengukur kepentingan struktur seseorang (Borgatti, 2006:25) dan menunjukkan orang yang boleh digelar pusat rangkaian. Pemusatan rangkaian dikira berdasarkan:

- a. *Degrees* (darajat) adalah berapa banyak hubungan yang dimiliki seseorang.
- b. *Betweenness* (keantaraan) adalah berapa besar individu mengawal aliran komunikasi di antara individu-individu dan rangkaian komunikasi yang lain.
- c. *Closeness* (kedekatan) adalah mengukur seberapa cepat seseorang boleh mengakses individu lain dengan jalur yang ringkas.

Menurut Rogers dan Shoemaker (dalam Siagian dan Yusof, 2011), pemuka pendapat merupakan pribadi-pribadi tertentu yang memiliki kemampuan

memengaruhi orang lain dalam perilaku opini melalui cara-cara yang disukai oleh orang-orang tersebut. Karakteristik pemuka pendapat adalah memiliki pengenalan akan mode yang tinggi. Seorang pemuka pendapat memahami kondisi khalayak yang beraneka ragam. Ia mampu memberikan pengertian tentang suatu informasi yang diperolehnya kepada khalayak dan khalayak dapat memahaminya dengan baik tanpa ada distorsi atas informasi tersebut. Kecenderungan lain adalah apa yang dikemukakan oleh seorang pemuka pendapat, akan diikuti oleh khalayak. Memiliki posisi dan kewenangan.

Di Indonesia, mereka yang termasuk dalam kategori pemuka pendapat yaitu para pemimpin alim ulama, guru, dokter, bangsawan, juragan, pedagang besar, kepala desa, ketua RT/RW, mantan pejabat pemerintah, mantan kebijakan maupun mantan militer, atlit berprestasi. Sumbangan yang mereka berikan kepada masyarakat adalah sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, seperti membina mental dan spiritual masyarakat, memberikan bantuan modal, melatih dalam bidang olah raga atau keterampilan hidup, pendidikan moral dan norma-norma budaya masyarakat, pemuka pendapat ini juga dikenali sebagai pihak yang mempunyai tahap kepercayaan yang tinggi.

Dalam proses komunikasi pemerintah pada suatu daerah, seorang pemuka pendapat memiliki peranan yang sangat penting. Informasi-informasi terkait dengan pemerintah di masyarakat pada umumnya terlebih dahulu dikemukakan kepada pemuka pendapat. Dari sinilah nanti akan menyebar ke masyarakat umum. Seperti permasalahan terkait tentang surat pemabataln yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dan pemerintah daerah Provinsi Riau,

pemuka pendapat memiliki pengaruh terhadap warganya untuk menyampaikan informasi terkait surat pembatalan tersebut.

B. Defenisi Operasional

Dalam penelitian ini, untuk menghindari kesalahan Dalam memahami makna konsep pemerintah daerah ada 3 hal yang perlukan diperhatikan yang berkaitan dengan pemerintah daerah, yaitu berkaitan dengan dimensi pengertian, bentuk pemerintah daerah dan berkenaan lingkungan yang berpengaruh terhadap pemerintah daerah. Konsep pemerintah daerah berasal dari terjemahan konsep *local government* pada intinya mengandung tiga pengertian yaitu: *pertama* berarti pemerintah lokal, *kedua* berarti pemerintah lokal dan *ketiga* berarti wilayah lokal (Hoessin dalam Hanif, 2007:24) dalam Aries Djaenuri.

Pemerintahan lokal pada pengertian *pertama* maksudnya adalah menunjuk pada lembaga, badan atau organisasi yang berfungsi menyelenggarakan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk kepada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam artian di Indonesia terfokus kepada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua badan ini yang bertugas untuk mengerakkan kegiatan sehari-hari di daerah.

Pemerintah lokal pada pengertian *kedua* mengacu pada kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan

pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah yang dijadikan dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Pemerintah lokal pada pengertian *ketiga* menunjukkan pada wilayah pemerintahan atau otonomi. Dalam hal ini daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Hak untuk mengatur diwujudkan dengan pembuatan peraturan pemerintah daerah yang pada intinya merupakan kebijakan umum pemerintah daerah sedangkan hak untuk mengurus rumah tangga daerah diwujudkan melalui implementasi peraturan daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan alat tertentu, dari pesan yang disampaikan oleh komunikator mendapat respon timbal balik sehingga terjadi lah proses komunikasi dua arah. Komunikasi efektif bisa terjadi karena adanya komunikator, komunikan, pesan, media, dan umpan balik.

Komunikasi sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk berinteraksi dengan orang disekitar kita. Komunikasi bertujuan untuk saling bertukar informasi, pesan dari seseorang ke orang lain , seseorang ke kelompok ataupun kelompok ke kelompok lainnya. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung dengan cara berbicara langsung kepada orang yang akan menerima pesan

yang kita sampaikan, ataupun secara tidak langsung dengan menggunakan alat seperti *handphone*, radio, TV, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.

2. Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan pemerintah daerah adalah tindakan yang dilakukan atau sikap yang diambil oleh pemerintah Daerah mengenai suatu hal yang terjadi dalam daerah pemerintahannya. Kemajuan Daerah Kabupaten atau Kota tergantung kebijakan Pemerintah Daerahnya sendiri, begitupun sebaliknya. Akan tetapi pemerintah Daerah juga harus mau mendengar keluhan kesah atau aspirasi dari masyarakatnya sehingga terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemerintah Daerah dengan masyarakat. Apabila hal tersebut sudah terlaksana maka suatu Daerah akan hidup maju dan damai.

3. Komunikasi Pemerintah Daerah

Komunikasi pemerintah adalah Proses penyampaian ide, perasaan, gagasan kepada berbagai pihak yang terkait dengan aktivis pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan komunikasi pemerintah pada dasarnya adalah untuk mencapai tujuan bersama antara komunikator dan komunikan dalam urusan pemerintahan.

4. Teori Pemuka Pendapat (*Opinion Leader*)

Teori pemuka pendapat (*opinion leader*) adalah teori yang menganggap bahwa seorang pemimpin atau komunikan yang dipercaya untuk

menyampaikan pesan kepada orang banyak dengan ketentuan- ketentuan tertentu yang dimikinya. Seseorang pemuka pendapat biasanya memiliki pengetahuan yang luas dan relasi yang banyak. Contoh orang yang sering disebut pemuka pendapat adalah para pemimpin alim ulama, guru, dokter, bangsawan, juragan, pedagang besar, kepala desa, ketua RT/RW, mantan pejabat pemerintah, mantan kebijakan maupun mantan militer, atlit berprestasi.

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut beberapa penelitian terdahulu dengan kesamaan pendekatan, topik dan subjek yang dipakai untuk membantu penelitian karena relevansinya..

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Yohanes Museng Ola Buluamang Dan Leope Pinnega Handika	Komunikasi Pemerintah Antara Perangkat Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara (NTT)	Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi komunikasi pemerintah yang terjadi antar perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Provinsi NTT dalam pengembangan Pariwisata. Hasil penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah perangkat daerah dalam pengembangan pariwisata mengalami berbagai problem yang berkaitan dengan tipe-tipe komunikasi, unsur unsur komunikasi, dan dimensi hubungan dalam komunikasi organisasi.
2	Ahmad Mustanir, Muhammad Rohady Ramadhan dan M Rais	Peranan Camat Dan Komunikasi Pemerintahan Terhadap Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Camat dan Komunikasi Pemerintahan terhadap Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa peranan Camat terhadap perencanaan pembangunan di Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang berjalan dengan baik. Berdasarkan nilai peranan Camat

		sebesar 90 % yang dikategorikan berperan terhadap perencanaan pembangunan. Berdasarkan nilai komunikasi pemerintahan sebesar 84 % dikategorikan berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan.
3	Aulia Rahman dan Diah Fatma Sjoraida	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Subang Untuk Menyosialisasikan Program “Gerakan Pembangunan Untuk Rakyat”, khususnya salah satu dari program Kabupaten Subang mengenai pengembangan infrastruktur untuk masyarakat yang disebut GAPURA INTAN (Gerakan Pembangunan Untuk Masyarakat Infrastruktur Berkelanjutan).</p> <p>Hasil dari penelitian ini adalah Upaya pemerintah dalam mengkomunikasikan program ini kepada masyarakat dengan cara hierarki pemerintahan dan menyosialisasikan kepada masyarakat secara langsung pada berbagai kesempatan yang ada. Namun awareness atau kesadaran masyarakat terhadap program ini masih sangat sedikit yaitu hanya 9% masyarakat yang mengetahui program GAPURA INTAN</p>

Sumber: Jurnal dan Google Cendikia

Kesamaan dari ketiga penelitian diatas adalah sama-sama untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam suatu permasalahan, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan fokus penelitian adalah:

1. Penelitian pertama bertujuan untuk mengeksplorasi komunikasi pemerintahan yang terjadi antar perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT dalam pengembangan pariwisata.

2. Penelitian kedua bertujuan untuk mengetahui Peranan Camat dan Komunikasi Pemerintahan terhadap Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang.
3. Penelitian ketiga bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Subang Untuk Menyosialisasikan Program “Gerakan Pembangunan Untuk Rakyat”, khususnya salah satu dari program Kabupaten Subang mengenai pengembangan infrastruktur untuk masyarakat yang disebut GAPURA INTAN (Gerakan Pembangunan Untuk Masyarakat Infrastruktur Berkelanjutan).

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambaran, sehingga tidak terfokus pada angka. Kualitatif mencoba mendalami rumusan masalah dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

Menurut Jaya (2020:111) penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran mengenai suatu fenomena atau keadaan yang terjadi. Fenomena dalam penelitian kualitatif sifatnya holistik atau menyeluruh. Sehingga, data yang ditemukan tidak dapat dipisahkan. Penelitian kualitatif awalnya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, artinya data yang dianalisis berasal dari gejala-gejala yang telah diamati, yang tidak selalu harus berbentuk angka ataupun koefisien antar variabel.

1. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian berdasarkan *purposive sampling*. Penelitian yang menggunakan *purposive sampling* adalah pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu

yaitu orang yang dianggap lebih tahu tentang apa yang diteliti Sugiyono (2010:124).

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.1 Subjek Penelitian

No	Subjek penelitian	Jumlah	Keterangan
1.	H.Abdul Haris S.Sos M.si	1	Sekretaris Daerah Rohul atau wakil Bupati Rokan Hulu.
2.	Rio Andri	1	Orang yang diutus oleh pemerintah daerah Rohul untuk menyampaikan surat pembatalan bendungan Rokan Kiri.
3.	Zulmanan	1	Salah seorang tokoh masyarakat Cipang Raya

Sumber: Peneliti, 2021

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah segala sesuatu permasalahan yang dianggap penting dan menjadi sasaran bagi peneliti. Dalam hal ini peneliti menetapkan objek penelitian ialah komunikasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu yang berhubungan dengan masalah pembatalan bendungan Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu,

2. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan pada tempat dan kegiatan yang di observasi. Lokasi penelitian ini dilakukan diKecamatan Rokan VI Koto, Kabupaten Rokan Hulu, provinsi Riau. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi

penelitian tersebut karena peneliti melihat adanya kebijakan pemerintah daerah terhadap pembatalan Bendungan Rokan Kiri di Kecamatan Rokan Kiri.

2. Waktu penelitian

Adapun waktu dan tahap - tahap penelitian yang dilaksanakan peneliti adalah sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Jadwal Rencana Penelitian

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN DAN MINGGU KE																				KET
		OKT				NOV				DES				FEBRUARI				MARET				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan penyusunan UP	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
2	Seminar UP										X											
3	Riset											X	X									
4	Peneliti Lapangan												X	X								
5	Pengolahan Dan Analisis Data														X							
6	Konsultasi Bimbingan skripsi														X	X	X	X	X			
7	Ujian Skripsi																				X	
8	Revisi dan pengesahan Skripsi penggandaan serta penyerahan																				X	
9	Skripsi																					X

3. Sumber Data

Menurut Bungin (2005: 119) data adalah bahan keterangan tentang objek penelitian yang dipilih didalam lokasi penelitian. Adapun menurut jenisnya data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga yang bersangkutan untuk dimanfaatkan Bungin (2005:122). Bentuk pengumpulan data ini yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan proses wawancara.
2. Data sekunder Data Sekunder merupakan sumber data yang peneliti peroleh melalui dokumen pendukung yang berkaitan dengan masalah penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpul data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

a. Wawancara

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Wawancara adalah tanya jawab dengan seorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai suatu hal. Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik ini untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari narasumber.

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik wawancara maksudnya adalah peneliti akan melakukan proses tanya jawab dengan narasumber-narasumber yang terlibat dalam masalah pembangunan Bendungan Rokan Kiri di Kecamatan Rokan IV Koto, mulai dari aparat pemerintah Daerah hingga ke tokoh masyarakatnya.

b. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi untuk memperkuat data-data yang telah ada dengan menggunakan foto, data pribadi, yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi ialah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut Bungin (2017:142-143).

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berupa pengumpulan data dengan cara mendokumentasi surat menyurat yang berhubungan dengan pembatalan Bendungan Rokan Kiri, dokumentasi berupa foto wilayah dan foto lainnya yang berhubungan dengan pembangunan Bendungan Rokan Kiri.

5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk mendapat hasil yang relevan dengan tujuan penelitian, peneliti menerapkan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu teknik Teknik Triangulasi. Menurut Sugiyono (2012: 327) teknik Triangulasi berarti menggunakan

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.

Triangulasi antar sumber data yang berfungsi untuk menggali relevansi informasi tertentu dari berbagai narasumber melalui teknik pengumpulan data yang sesuai, kemudian data tersebut dideskripsikan, dikategorikan dan dianalisis.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data diperoleh dari peneliti untuk mengambil kesimpulan hasil peneliti. Proses peneliti data dengan menelaah seluruh data yang ada tersedia dari berbagai sumber yang telah diperoleh dari peneliti, yaitu wawancara, pengalaman yang sudah di tuliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya Moleong (2005:103).

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang paling penting dari data yang diperoleh. Dengan demikian data yang direduksi akan menggambarkan secara jelas.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti dapat memahammi apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu mencari bukti yang kuat untuk mendukung dan menjawab rumusan masalah yang ada, kesimpulan berisi tentang jawaban atas pertanyaan yang diajukan tentang permasalahan yang diteliti lebih fokusnya untuk menjawab rumusan masalah yang ada.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

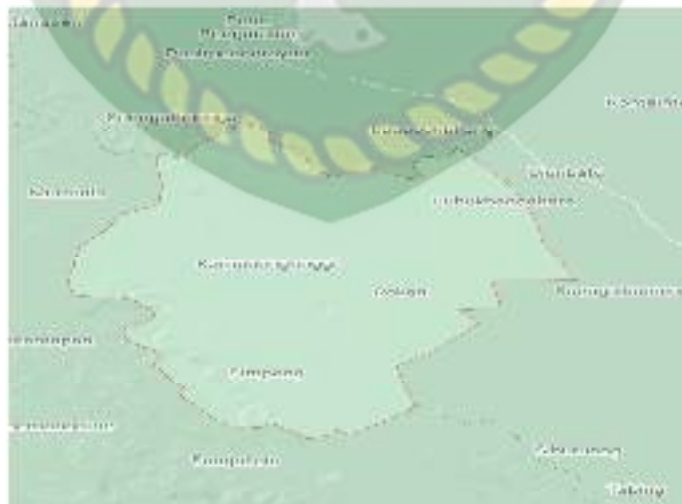
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian tentang bagaimana proses komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu tentang pembatalan Bendungan Rokan kiri di Kecamatan Rokan IV Koto. Hasil penelitian diperoleh dengan teknik wawancara baik itu wawancara langsung ataupun tidak langsung (telfon seluler) dan dokumentasi dilapangan. Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan 18 Februari 2021 dengan mengumpulkan informan sebanyak 3 orang dan ke 3 orang ini merupakan orang- orang yang terlibat dari pembatalan pembangunan Bendungan Rokan Kiri tersebut.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Rokan IV Koto

Gambar 4.1 Peta Posisi Kecamatan Rokan IV Koto



Sumber: Google Maps, 2020

Rokan IV Koto merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, dengan Ibu Kota Kecamatan terletak di Rokan. Rokan itu sendiri merupakan sebuah nama Sungai yang membelah pulau Sumatera dibagian tengah, yang bermuara kebagian Utara pulau tersebut (Selat Malaka). Pada zaman dahulu daerah Rokan Hulu dikenal dengan sebutan Rantau Rokan atau Luhak Rokan, hal ini disebabkan karena tempat ini merupakan tempat perantauan suku Minangkabau yang berasal dari Sumatra Barat. Wilayah Rokan Hulu terbagi atas dua daerah yaitu Rokan Kanan dan Rokan Kiri, dan Kecamatan Rokan IV Koto merupakan bagian dari Rokan Kiri.

Kecamatan Rokan IV Koto merupakan Kecamatan terluas di Kabupaten Rokan Hulu yang mempunyai luas 152. 223,01 Ha. Berdasarkan pembentukannya batas kecamatan Rokan IV Koto adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pendalian IV Koto
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kabun

Kecamatan Rokan IV Koto terdiri dari 14 Desa, berikut adalah 14 Desa atau Kelurahan yang terdapat dikecamatan Rokan IV Koto:

1. Desa Alahan
2. Desa Cipang Kanan
3. Desa Cipang Kiri Hilir

4. Desa Cipang Kiri Hulu
5. Desa Lubuk Bendahara
6. Desa Lubuk Bendahara Timur
7. Desa Lubuk Betung
8. Desa Pemandang
9. Desa Tibawan
10. Kelurahan Rokan
11. Desa Rokan Koto Panjang
12. Desa Sikebau Jaya
13. Desa Rokan Timur
14. Desa Tanjung Medan

Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Rokan IV Koto sebagian besar adalah sebagai petani karet dan sawit. Kondisi perekonomian di Kecamatan Rokan IV Koto pada umumnya mengalami peningkatan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 12 unit pasar umum yang tersebar di Kecamatan Rokan IV Koto, terdapat 10 TK (taman kanak-kanak), 33 SD/MI, 10 SMP/MTS dan 4 SMA/ MA. Sedangkan dari segi pelayanan kesehatan di Kecamatan Rokan IV Koto terdapat 2 unit Pukesmas, 6 unit Pustu, 32 unit Pos KB, di bantu dengan tenaga medis yang terdiri dari 4 orang Dokter dan 11 Perawat Bidan.

Dari segi objek wisata Kecamatan Rokan IV Koto juga memiliki objek wisata alam yang sering dikunjungi oleh masyarakat luas. Adapun objek wisata yang terdapat di Kecamatan Rokan IV Koto diantaranya adalah Istana Rokan,

Makam-makam Raja Rokan, Air Terjun (Hujan Lobek), puncak Kabur, Puncak Talang Perindu dan masih banyak lagi objek wisata yang lainnya.

Gambar 4.2 Salah Satu Objek Wisata Yang Ada Di Rokan (Istana Raja Rokan)



Sumber: Dokumentasi pribadi.

Akan tetapi dari 14 Desa atau Kecamatan yang terdapat di Kecamatan Rokan IV Koto seperti yang peneliti paparkan diatas tadi disini peneliti fokus ke 4 Desa yang bersangkutan dalam pembatalan pembangunan Bendungan Rokan Kiri di Kecamatan Rokan IV Koto, adapu ke 4 Desa tersebut adalah: Desa Cipang Kanan, Desa Cipang Kiri Hulu, Desa Cipang Kiri Hilir dan Desa Tibawan.

2. Visi Dan Misi Kecamatan Rokan IV Koto

a. Visi

Visi merupakan sebuah rumusan umum dalam suatu proses perencanaan, dengan adanya visi maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan apa yang di cita-citakan. Oleh karena itu adapun visi dari Kecamatan Rokan IV Koto adalah “ Bartekad Mewujudkan Kecamatan Rokan IV Koto Yang Sejahtera Melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan Dan Kehidupan Agamis Yang Harmonis”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Rokan IV Koto menetapkan beberapa misi yang dapat dicapai melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terujud keseimbangan pembangunan antara Desa serta kelompok masyarakat.
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang baik bagi masyarakat dengan aparat yang tangguh dan profesional dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan.
3. Mewujudkan ketersediaan akses dari Desa ke Kota yang bertujuan untuk membuka aksesibilitas produksi perekonomian masyarakat Desa.

4. Mewujudkan masyarakat dan aparat yang sehat dengan menyediakan infrastruktur fisik dan non fisik di pedesaan.
5. Mewujudkan kehidupan yang beragama yang didasarkan dengan kebudayaan yang saling menghormati antara etnik dan agama yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman.

B. Hasil Penelitian

1. Hasil Wawancara

a. Informan Pertama H.Abdul Haris S.Sos M.si (Sekretaris Daerah/ Wakil Bupati Rokan Hulu)

H.Abdul Haris S.Sos M.si lahir pada tanggal 17 November 1970, beliau menyelesaikan S1 di Universitas Lancang Kuning dan S2 nya di Universitas Islam Riau. Beliau resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Rokan Hulu H. Sukiman, sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Rohul sekaligus menjadi wakil Bupati Rokan Hulu pada tanggal 24 September 2018. Beliau juga menjelaskan kenapa dia biasa memegang dua jabatan sekaligus, itu disebabkan karena bapak H.Suparman, S.Sos. M,si (Bupati sebelumnya) yang melakukan Korupsi dan masuk penjara. Oleh karena itu wakil Bupati nya naik jabatan menggantikan posisi tersebut, dengan demikian bapak H.Abdul Haris S.Sos M.si dipercayai memegang dua jabatan sekaligus sampai dengan pemilihan Bupati dan wakil Bupati baru nantinya. Sebelum dilantik menjadi Sekretaris Daerah H.Abdul Haris S.Sos M.si juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas PMPD Rohul dan Staf ahli Bupati Rohul.

Gambar 4.3 Bapak H.Abdul Haris S.Sos M.si (Sekretaris Daerah / Wakil Bupati Rokan Hulu)



Sumber: Dokumentasi H.Abdul Haris S.Sos M.si

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan secara langsung dengan bapak H.Abdul Haris S.Sos M.si (Sekretaris Daerah/ Wakil Bupati Rokan Hulu) dikantor Bupati Rokan Hulu pada tanggal 15 Februari 2021, dengan mengajukan pertanyaan- pertanyaan sebagai berikut:

Pertanyaan: Apa tujuan dari pembangunan Bendungan Rokan Kiri?

“Tujuan dari pembangunan Bendungan Rokan Kiri ini sebenarnya banyak dan menguntungkan bagi masyarakat. Seperti tertulis dalam peraturan Presiden No 58 tahun 2017 yang mana mengatakan bahwa waduk atau bendungan ini merupakan salah satu proyek Nasional. Adapun tujuan pembangunannya untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Saya kira seandainya masyarakat sekitar mampu mengelolanya dengan baik juga bisa dijadikan tempat wisata”.

Pertanyaan: Apakah pembangunan Bendungan Rokan Kiri sudah dikomunikasikan kepada masyarakat sekitar Bendungan itu akan dibangun?

“Oh, sudah jelas kita komunikasikan terlebih dahulu kepada masyarakat yang bersangkutan tujuannya apa? Supaya masyarakat itu tau bahwa akan

dibangun infrastruktur yang berguna untuk mensejahterkan masyarakat itu sendiri. Pemerintah daerah mensosialisasikan pembangunan Bendungan Rokan Kiri kepada masyarakat 4 desa yang berada di Kecamatan Rokan IV Koto, dan kenapa 4 desa ini yang dilakukan sosialisasi, hal itu di sebabkan karena 4 desa inilah yang nantinya apabila bendungan ini dibangun ke 4 desa ini akan mengalami penggusuran. Akan tetapi respon yang diberikan oleh masyarakat ketika pemerintah mensosialisasikan pembangunan bendungan ini, ditolak secara mentah-mentah tanpa mengetahui sebab dan akibatnya. Dan hal ini lah yang menjadi dasar kenapa sampai saat ini bendungan Rokan Kiri tidak jadi dibangun”

Pertanyaan: Apa sajakah yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah Rohul dalam memenuhi keinginan masyarakat bahwa pembangunan Bendungan Rokan Kiri batal dibangun?

“Kalo ditanya alasan kami selaku pemerintah Daerah kenapa kami menyetujui bahwa pembangunan Bendungan Rokan Kiri batal dibangun, yang pertama kami melihat respon yang dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat 4 Desa yang saya bilang tadi mereka tidak setuju dan sangat menolak adanya pembangunan bendungan tersebut. Bentuk penolakan yang mereka lakukan, mereka sempat mengadakan aksi Demontrasi yang membawa massa yang cukup banyak di depan kantor ini, mungkin adek mahasiswa mengetahui kejadian ini karena juga merupakan masyarakat sana kan, nah mereka memaksa agar pemerintah daerah kabupaten mengeluarkan surat pembatalan, apabila pemerintah daerah tidak mengeluarkan surat pembatalan yang diminta pada saat itu, mereka mengancam akan merusak fasilitas yang ada di kantor ini. Oleh sebab itu pemerintah daerah menyetujui permintaan masyarakat dengan mengeluarkan surat pembatalan bendungan Rokan Kiri”

Gambar 4.4 saat masyarakat Cipang Raya melakukan demonstrasi didepan kantor Bupati Rohul



Sumber: Dokumentasi Rio Andri

Pada gambar diatas dijelaskan bahwa masyarakat Cipang Raya melakukan aksi demonstrasi didepan kantor Bupati Rokan Hulu. Yang tujuannya adalah meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk mengeluarkan surat pembatalan pembangunan Bendungan Rokan Kiri yang akan menenggelamkan kampung mereka. Dapat dilihat dari gambar tersebut masyarakat yang melakukan aksi terdiri dari beberapa golongan yaitu, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu maupun tokoh pemuda dari masyarakat Cipang Raya. Dan juga Bupati Rokan Hulu sendiri H. Sukiman berpidato di depan masyarakat.

Pertanyaan: Apakah keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah saat itu sudah tepat?

“untuk saat itu keputusan tersebut sudah tepat diambil untuk menenangkan masyarakat saat demo berlangsung, perlu adik mahasiswa ketahui saya lupa tadi, surat pembatalan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah bukan pada saat demo itu berlangsung, akan tetapi kami meminta waktu kepada masyarakat saya kurang ingat waktunya berapa lama tetapi tidak

sampai 1 bulan dari mereka melakukan aksi kami baru mengeluarkan surat tersebut. Dan surat pembatalan yang kami keluarkan akan mereka teruskan ke pemerintah daerah provinsi”

Pertanyaan: Berhubung dengan surat pembatalan pembangunan Bendungan Rokan Kiri sudah keluar, siapa yang bapak utus untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat?

“pada saat melakukan aksi Demonstrasi kami mengundang atau mempersilahkan masuk perwakilan dari masyarakat tersebut. Kalau tidak salah pada saat demo kami selaku pemerintah daerah membuat perjanjian dengan masyarakat, yang mana pada saat itu pihak dari masyarakat 4 desa itu diwakilkan oleh koordinator lapangan pada saat demo tersebut. Seperti yang saya bilang tadi kami membuat kesepakatan bahwa dalam beberapa waktu kedepan kami akan mengeluarkan surat yang diinginkan oleh masyarakat dan apabila kami tidak mengeluarkan surat tersebut mereka mengancam akan membawa lebih banyak massa lagi dan merusak fasilitas yang ada disini. Nah berhubung pemerintah daerah sudah setuju untuk mengeluarkan surat pembatalan, maka saya langsung menghubungi koordinator lapangan pada saat itu untuk menyampaikan surat pembatalan tersebut kepada masyarakat luas”

Pertanyaan: Kenapa bapak memilih dia sebagai orang menyampaikan informasi terkait surat pembatalan?

“seperti yang saya bilang tadi saya memilih koordinator lapangan yang memimpin aksi demonstrasi pada saat itu sebagai orang yang saya percaya dalam menyampaikan surat pembatalan kepada masyarakat karena dialah orang yang ditunjuk oleh masyarakat itu sendiri sebagai perwakilan mereka. Dan juga setelah saya amati memang dia salah satu tokoh yang paling aktif terkait penolakan pembangunan Bendungan Rokan kiri ini, jadi secara tidak langsung pun saya menunjuk dia untuk menyampaikan hal terkait surat tersebut kepada masyarakat”

Pertanyaan: Apakah tidak ada orang lain selain dia yang bapak utus untuk menyampaikan surat pembatalan kepada masyarakat?

“tidak, sempat saya berfikir akan menugaskan bapak camat Rokan IV Koto yang akan menyampaikan surat ini kepada masyarakatnya. Akan tetapi

karena kami sudah membuat perjanjian dengan salah satu perwakilan masyarakat sana maka kan lebih efisien dia yang kami tunjuk untuk menyampaikannya. Begitu surat keluar saya langsung menghubunginya dan saya suruh untuk menyampaikan surat tersebut langsung kepada masyarakat, karena kan surat tersebut hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan alangkah lebih baiknya cepat disampaikan kepada masyarakat, kenapa saya harus mencari orang lain untuk menyampaikan surat tersebut kepada masyarakat sedangkan orang yang dipercaya masyarakat sudah ada didepan saya dan alangkah lebih mudah nya kalau dia yang saya utus untuk menyampaikannya kepada masyarakat”.

Gambar 4.5 saat pemerintah daerah Rohul menyampaikan surat pembatalan kepada perwakilan masyarakat.



Dokumentasi : Rio Andri.

Pada gambar diatas dijelaskan bahwa pemerintah Dearah Kabupaten Rohul yang terdiri dari Bupati Rohul (H. sukiman), Sekretaris Daerah Rohul (H.Abdul Haris S.Sos M.si) beserta staf lainnya memanggil dan mengumpulkan Rio Andri (koordinator lapangan aksi demo) dan beberapa orang lainnya. Tujuannya adalah untuk memberitahu bahwa surat penolakan pembangunan

Bendungan Rokan Kiri sudah keluar dan agar Rio Andri menyampaikan langsung kepada Masyarakat Cipang.

P: Dalam mengkomunikasikan surat pembatalan pembangunan Bendungan Rokan Kiri kepada masyarakat, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikannya surat tersebut?

“kalau ditanya masalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikannya kepada masyarakat sendiri saya kurang tau, saya kan tidak turun langsung kelapangan untuk menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat”.

Pertanyaan: Faktor pendukung dan penghambat apa sajakah yang dirasakan oleh pemerintah daerah Rohul dalam mengkomunikasikan surat pembatalan?

“faktor yang menjadi pendukung yang kami rasakan sebagai pemda rohul dalam menyampaikan surat kepada masyarakat adalah karna tadi itu, karna sudah ada orang kepercayaan masyarakat yang langsung bisa di utus untuk menyampaikan surat pembatalan kepada masyarakat. Kalo faktor penghambatnya sih gak ada, semua berjalan lancar.

Pertanyaan: Apakah cara yang bapak lakukan dalam menyampaikan surat pembatalan kepada masyarakat sudah efektif?

“hmmm. Menurut saya sudah ya, kenapa bisa saya katakan demikian, karena sejak saat itu masyarakat tidak ada lagi melakukan protes ataupun demo lagi. Dengan begituan mereka sudah mengetahui bahwa surat penolokan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten sudah ada”.

- b. Informan Kedua Rio Andri (Koordinator Lapangan Saat Aksi Demonstrasi Sekaligus Orang Yang Ditunjuk Untuk Menyampaikan Surat Pembatalan Kepada Masyarakat).**

Gambar 4.6 Rio Andri (Tokoh Muda Cipang Raya)



Sumber: Dokumentasi Rio Andri.

Rio Andri merupakan salah seorang pemuda Cipang yang lahir pada 1 Januari 1996, beliau lahir dan dibesarkan di Lubuk Ulat, Cipang Kiri Hulu, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Rio Andri juga merupakan seorang tokoh pemuda yang sangat aktif dalam berbagai organisasi. Hal ini juga mendorong diri untuk membela tanah kelahiran dan masyarakatnya ketika adanya pembangunan Bendungan Rokan Kiri. Dia orang yang sangat aktif dalam memperjuangkan bahwa pembatalan Bendungan Rokan Kiri batal dibangun, hal ini dibuktikan dengan dia menjabat menjadi koordinator lapangan saat masyarakat Cipang Raya melakukan aksi Demonstrasi yang tujuannya untuk meminta

pemerintah daerah Kabupaten mengeluarkan surat pembatalan bendungan Rokan Kiri. Rio Andri sangat berani dan lantang saat menyampaikan aspirasinya di depan kantor Bupati Rokan Hulu, usaha yang dilakukan Rio Andri bersama masyarakat Cipang Raya tidak sia-sia, setelah melakukan aksi demonstrasi tersebut akhirnya pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan surat pembatalan dan Rio Andri ditunjuk sebagai orang yang akan menyampaikan surat itu kepada masyarakat Cipang Raya.

Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara secara langsung (21 Februari 2021) maupun wawancara tidak langsung (melalui telfon seluler) dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

Pertanyaan: Apakah benar bapak sebagai koordinator lapangan saat aksi demonstrasi pembatalan pembangunan Bendungan Rokan Kiri?

“Benar sekali saat aksi demonstrasi saya sebagai koordinator lapangannya yang berkoar-koar menyampaikan hak dan aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat Cipang. Saya sebenarnya dalam masalah Bendungan ini tidak hanya sebagai koordinator lapangan saat aksi demo berlangsung, akan tetapi saya juga merupakan orang yang mengurus surat-surat terkait pembatalan pembangunan Bendungan Rokan Kiri. Begitu juga saat pemerintah daerah Kabupaten mengeluarkan surat pembatalan perjuangan kami tidak hanya sampai disitu saja, kemudian saya berserta masyarakat Cipang mengumpulkan massa yang lebih banyak lagi untuk melakukan aksi Demo selanjutnya di depan Kantor Gubernur Provinsi Riau, tujuannya sama dengan demo sebelumnya yang dilakukan di kantor Bupati. Dan alhamdulillah nya surat pembatalan dari Sekretaris Daerah Provinsi pun berhasil kami dapat walaupun perjuangannya cukup panjang.

Pertanyaan: Apakah benar bapak orang yang dipilih oleh pemerintah daerah Kabupaten Rohul untuk menyampaikan surat pembatalan pembangunan Bendungan Rokan Kiri kepada masyarakat?

“Sebenarnya bukan dipilih juga ya, akan tetapi seperti yang saya sampaikan tadi saya banyak mengurus surat menyurat tentang permasalahan Bendungan ini dan kebetulan saat itu saya yang membuat perjanjian bersama bapak Sekda dan bapak Sukiman (Bupati Rokan Hulu) apabila mereka tidak mengeluarkan surat pembatalan yang kami minta, kami masyarakat Cipang akan mengadakan aksi dengan membawa massa yang lebih banyak lagi. Mungkin mereka takut dengan ancaman kami, setelah 2 minggu dari membuat perjanjian tersebut akhirnya bapak Sekda menghubungi saya dan meminta agar saya menyampaikan bahwa surat pembatalan pembangunan Bendungan sudah keluar dan harus disampaikan kepada masyarakat.

Pertanyaan: Bagaimana cara bapak menyampaikan surat pembatalan pembangunan tersebut kepada masyarakat Cipang Raya?

“Agak panjang ya prosesnya, langkah pertama yang saya lakukan untuk menyampaikan surat pembatalan kepada masyarakat Cipang Raya adalah dengan menghubungi kepala Desa dari 4 Desa ini, diantaranya adalah Desa Cipang Kanan, Desa Tibawan, Desa Cipang Kiri Hulu dan Desa Cipang Kiri Hilir. Tujuan saya menghubungi dan mengumpulkan ke 4 kepala Desa ini agar masing-masing dari mereka yang menyampaikan langsung terkait surat pembatalan bendungan yang di keluarkan Sekda Daerah Kabupaten kepada warganya. Rasanya kurang etis ya kalau saya yang menyampaikan hal tersebut, karena saya bukan siapa-siapa yang mempunyai hak untuk itu, akan tetapi seperti yang saya sampaikan tadi saya di hubungi oleh bapak Sekda karena pada saat itu kami yang membuat perjanjian akan hal itu. Akan tetapi setelah saya menyampaikan hal tersebut kepada ke 4 kepala Desa ini, mereka tidak setuju dan meminta agar saya yang menyampaikan secara langsung. Dengan demikian karena mereka telah mempercayai saya untuk menyampaikan secara langsung maka saya mempunyai tanggung jawab besar yaitu untuk menyampaikan informasi terkait surat pembatalan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten. Tentunya masyarakat sangat menunggu dan senang menerima informasi ini. Selanjutnya untuk menyampaikan langsung kepada masyarakat yang saya lakukan adalah membuat jadwal dari masing-masing Desa ini dengan berkoordinasi dengan kepala Desanya kapan dan dimana bisa mengumpulkan masyarakat. Setelah mengatur jadwal tadi saya langsung turun kemasyarakat untuk menyampaikan surat pembatalannya.

Gambar 4.7 Rio Andri Saat Menyampaikan Surat Pembatalan Kepada Masyarakat.



Sumber: Dokumtasi Rio Andri

Gambar diatas menjelaskan tentang adanya perkumpulan masyarakat yang bertempat di Los Pasar Desa Cipang Kanan dan tujuan mereka berkumpul adalah untuk mendengarkan Informasi yang akan disampaikan oleh Rio Andri terkait surat pembatalan Bendungan Rokan Kiri.

Pertanyaan: Berapa lama waktu yang bapak butuhkan untuk menyampaikan surat pembatalan tersebut?

“Dalam menyampaikan surat Pembatalan itu saya membutuhkan waktu kurang lebih 10 hari. Kenapa bisa 10 hari, karena saya harus menyampaikan dan mengikuti jadwal yang telah di tetapkan dari masing-masing Desa ini, lagi pula jarak Desa 1 dengan yang lainnya cukup jauh dan aksesnya lumayan susah”.

Pertanyaan: faktor pendukung dan penghambat apa yang bapak rasakan dalam menyampaikan surat pembatalan Bendungan kepada masyarakat Cipang Raya?

“Kalau faktor pendukung jelas banyak ya, semua orang atau pun pihak masyarakat Cipang sangat antusias untuk mendengarkan informasi ini dengan begitu semua jalannya untuk saya menyampaikan ini dipermudah, mulai dari waktunya, tempat dan lain-lainnya. Kalo ditanya faktor penghambatnya sih gak ada ya”.

Pertanyaan: Menurut bapak strategi atau cara yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu terkait untuk menyampaikan surat pembatalan kepada masyarakat seperti apa?

“menurut saya sebagai masyarakat awam ya, yang tidak terlalu paham dengan dunia pemerintahan ataupun politik, strategi terbaik sudah dilakukan dengan pendekatan persuasif baik melalui perwakilan tokoh masyarakat dan secara umum masyarakat setempat menyakini bahwa kehadiran tokoh itu merupakan suatu informasi yang benar adanya, sehingga masyarakat dapat menerima dengan senang hati dan percaya juga tentunya terhadap informasi yang disampaikan”.

Pertanyaan: Untuk dimasa yang akan datang, apa yang seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu?

“harapan saya pribadi untuk Pemda daerah, ketika membuat program harus didudukkan terlebih dulu kepada masyarakat dengan tujuan tidak ada yang dirugikan. Apabila kedua belah pihak sudah sepakat baru dilanjutkan pembangunannya dan tidak terlepas juga harus memperhatikan aspek seperti, budaya, lingkungan, ekonomi dan dampak yang ditimbulkan”.

c. Informan Ketiga Zulmanan (Masyarakat Desa Cipang Kanan)

Beliau merupakan salah satu warga Desa Cipang Kanan yang berusia 55 tahun. Beliau juga bagian dari masyarakat yang ikut menolak adanya pembangunan Bendungan Rokan Kiri dengan tergabung dalam aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Rokan Hulu. Dan tentunya beliau juga sangat merasa senang dengan dikeluarkannya surat pembatalan Bendungan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 23 Februari 2021 dengan menggunakan telfon seluler, dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

Pertanyaan: Adakah bapak pernah menerima informasi terkait surat pembatalan Bendungan Rokan Kiri?

“Oh masalah surat itu, iya saya ada mendapat informasi mengenai surat pembatalan Bendungan, yang kami sendiri sebagai masyarakat terdampak sangat menolak pembangunan itu.

Pertanyaan: Siapa yang menyampaikan surat pembatalan pembangunan Bendungan Rokan Kiri kepada masyarakat?

“Yang menyampaikan surat pembatalan kepada masyarakat sendiri adalah adinda yang bernama Rio Andri”.

Pertanyaan: Bagaimana pandangan bapak tentang cara pemerintah menyampaikan kebijakan terkait surat pembatalan pembangunan Bendungan Rokan Kiri?

“Menurut pandangan saya sebagai masyarakat, cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah cukup bagus, tetapi kenapa tidak pemerintah daerah itu sendiri yang langsung turun ke masyarakat untuk menyampaikan surat itu. Mungkin banyak juga alasan yang lain kenapa pemda sendiri tidak langsung kemasyarakat dan memilih Rio Andri untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Rio Andri dalam menyampaikan informasi surat pembatalan sudah cukup baik, karena dia menyuruh semua masyarakat untuk berkumpul supaya masyarakat bisa dengar sendiri bahwa yang kami perjuangkan selama ini telah ada hasilnya. Dan untuk di kampung kami saya kira itu adalah cara yang efektif dilakukan, kalo misalnya dengan menggunakan internet sedangkan jaringan saja dikampung kami gak ada”.

Pertanyaan: Apakah sebelumnya bapak mengenal Rio Andri?

“saya mengenal Rio Andri pada saat melakukan aksi demo ya, dan memang dia salah seorang pemuda yang cukup aktif dalam masalah Bedungan ini”.

Pertanyaan: Apa respon yang dirasakan masyarakat saat Rio Andri menyampaikan bahwa surat pembatalan Bendungan Rokan Kiri sudah dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu?

“Yang jelas kami merasa senang dengan perjuangan tahap pertama yang kami lakukan sudah membuahkan hasil dan juga pada saat itu kami bertambah semangat lagi untuk meneruskan surat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten ke pemerintah daerah Provinsi. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada adinda Rio Andri sebagai anak muda yang mempunyai kesadaran tinggi untuk sama-sama berjuang dengan masyarakat Cipang”.

C. Pembahasan Penelitian

Bagian ini membahas tentang bagaimana komunikasi yang dilakukan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Rokan Hulu terkait surat pembatalan pembangunan Bendungan Rokan Kiri di Kecamatan Rokan IV Koto Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Rokan Hulu, berikut pembahasan dan analisis peneliti:

a. Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Dalam Menyampaikan Surat Pembatalan Bendungan Rokan Kiri.

Menurut Lely Arrianie (2010:14) komunikasi pemerintah sama dengan komunikasi politik yaitu penyampaian pesan yang disusun secara sengaja untuk mendapatkan pengaruh atas penyebaran atau penggunaan *power* kepada masyarakat.

Menurut effendy (2011) Strategi komunikasi adalah perencanaan komunikasi yang efektif dalam penyampain pesan sehingga dengan mudah

dipahami oleh komunikan dan bisa menerima apa yang telah disampaikan dengan demikian bisa mengubah sikap atau perilaku seseorang. Menurut Effendy (2008:29) Strategi komunikasi terdiri dari :

1. perencanaan komunikasi (*communication planing*)
2. manajemen komunikasi (*communication management*)
3. pendekatan (*approach*)
4. Evaluasi (*evaluation*)

Setiap unsur-unsur dari strategi komunikasi harus dipahami dengan baik karena semua unsur merupakan implementasi cara untuk membentuk strategi komunikasi termasuk dalam kegiatan penyebaran informasi. Masalah kebijakan adalah suatu kondisi yang menghasilkan kebutuhan dan ketidakpuasan di tengah-tengah masyarakat sehingga perlunya penyelesaian oleh pemerintah. Dalam masalah ini pemerintah melakukan penyelesaian konflik dengan cara mengeluarkan surat kebijakan bahwa Bendungan Rokan Kiri batal dibangun,.

Menurut Harold J Laswell yang mengemukakan “*who syays what in which channels to whom with what effects*”. Berhasil tidaknya suatu strategi komunikasi tidak terlepas dari unsur-unsur yang terkait seperti yang diuraikan berikut ini (dalam Hasan 2005: 44-45)

- 1) *Who*, siapa yang menyampaikan pesan?
- 2) *Says what*, pesan apa yang disampaikan?
- 3) *In which channel*, media apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan?

- 4) *To whom*, siapa yang akan menerima pesan yang disampaikan?
- 5) *With what effect*, dampak apa yang diharapkan dari pesan yang disampaikan?

Berdasarkan penjelasan diatas yang menjelaskan terdapat beberapa unsur-unsur penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan strategi komunikasi. Dan pemerintah Rokan Hulu telah menerapkan hal tersebut dalam strategi penyampaian surat pembatalan pembangunan Bendungan Kiri kepada masyarakat. Sehingga surat pembatalan Bendungan rokan kiri tersampaikan dengan baik.

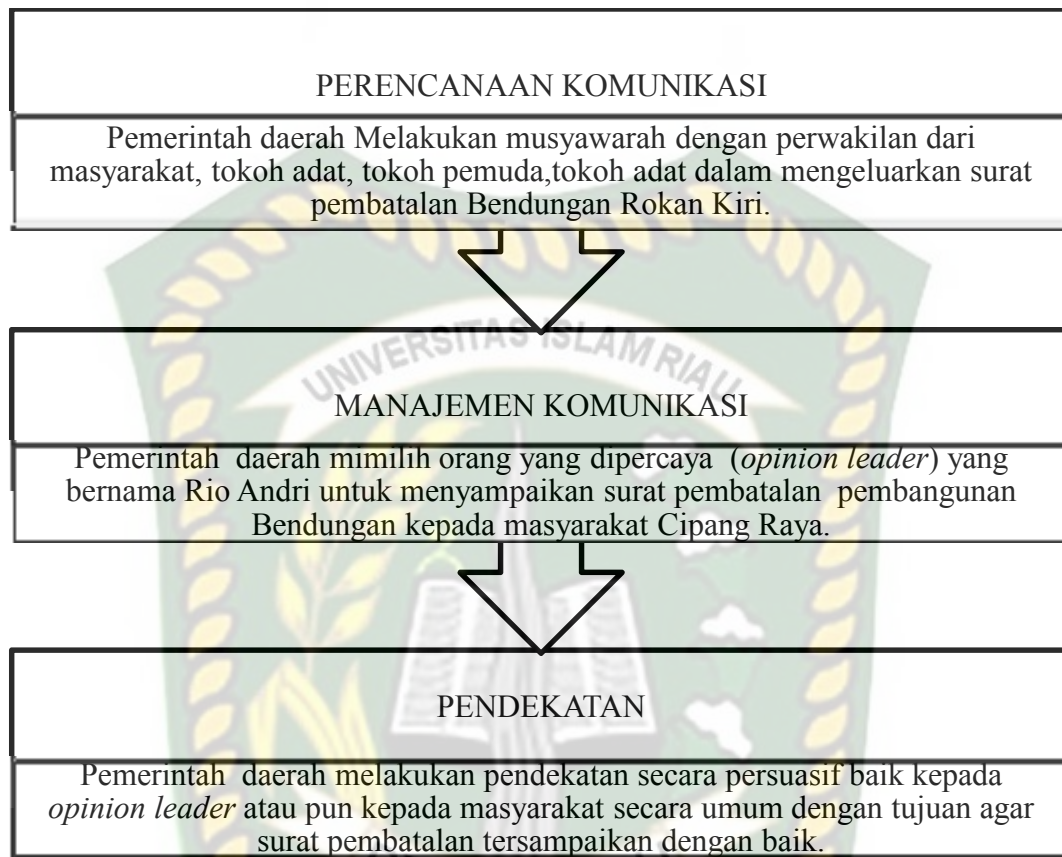
Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan dengan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Rokan Hulu adalah dengan melakukan proses perencanaan. Proses perencanaan komunikasi (*communication planing*) yang dimaksud disini adalah proses bagaimana tindakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam mengeluarkan surat pemabatalan pembangunan Bendungan Rokan Kiri. Oleh karena itu pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu melakukan rapat atau musyawarah bersama dengan staf-staf yang ada dilingkungan kerja pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dan musyawarah juga melibatkan perwakilan dari masyarakat Cipang Raya yang terdiri dari tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Setelah melakukan proses musyawarah yang cukup panjang akhirnya Bupati Rokan Hulu bersama staf-staf yang terlibat memutuskan untuk mengeluarkan surat pembatalan pembangunan Bendungan Rokan Kiri sesuai yang diinginkan oleh masyarakat Cipang Raya.

Strategi selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu manajemen komunikasi (*communication management*). Maksudnya adalah bagaimana pemerintah daerah mengatur atau memilih cara supaya surat pembatalan pembangunan Bendungan Rokan Kiri tersampaikan baik kepada masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu memilih cara dengan memilih orang yang pantas menyampaikan surat pembatalan. Dengan menerapkan strategi tersebut pemerintah daerah Rokan Hulu akhirnya memilih perwakilan dari masyarakat Cipang Raya itu sendiri yaitu yang bernama Rio Andri.

Sebagai *Opinion leader* yang memiliki kemahiran atau kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain, pemuka pendapat juga mempunyai wawasan luas dan mengetahui berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat, terutama masalah pembatalan pembangunan Bendungan Rokan Kiri. pemuka pendapat (*opinion leader*) dapat dibedakan dari orang lain dengan tiga kriteria: "siapa dia", personifikasi dari nilai-nilai tertentu; "Apa yang dia ketahui", kompetensinya dan "siapa yang dia kenal".

Dan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyampaikan surat pembatalan adalah dengan cara melakukan pendekatan (*approach*) kepada orang yang dipercaya untuk menyampaikan surat pembatalan kepada masyarakat. Bentuk pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu yaitu dengan cara mengenal lebih jauh Rio Andri, seperti mencari tahu seberapa kredibilitas yang dia miliki untuk menyampaikan surat.

Model 4. 1 Model Strategi Komunikasi



Sumber: peneliti 2021

Seharusnya pemerintah daerah menerapkan semua strategi komunikasi diatas yang terdiri dari perencanaan komunikasi (*communication planing*), manajemen komunikasi (*communication management*), pendekatan (*approach*), Evaluasi (*evaluation*), supaya komunikasi yang dilakukan efektif. Akan tetapi berdasarkan temuan peneliti dilapangan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu tidak melakukan proses Evaluasi (*evaluation*) terhadap apa yang telah dilakukannya. Evaluasi merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa strategi yang digunakan untuk meyampaikan surat pembatalan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

Akan tetapi karena pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu tidak melakukan proses evaluasi (*evaluation*) maka pemerintah daerah Kabupaten sendiri tidak mengetahui dengan pasti apakah strategi yang mereka gunakan dalam menyampaikan surat pembatalan kepada masyarakat sudah efektif atau belum. Pemerintah daerah mempercayakan sepenuhnya kepada *opinion leader* yang telah dipilih oleh pemerintah daerah itu sendiri tanpa memastikan secara langsung apa yang terjadi sebenarnya dilapangan, pemerintah daerah juga percaya bahwa surat pembatalan pembangunan Bendungan Rokan Kiri sudah tersampaikan kepada masyarakat karena tidak adanya masyarakat yang melakukan protes atau aksi lagi ke pemerintah daerah Kabupaten Rokan Kiri.

b. Pemuka pendapat (*opinion leader*) dalam menyampaikan surat pembatalan kepada masyarakat Cipang Raya.

Pemuka pendapat (*opinion leader*) adalah orang yang memiliki pengalaman pengetahuan dan membawa pesan atau informasi yang bisa merubah pola tingkah laku sekelompok orang. Menurut Haidir Fitra Siagian (2013) Ada dua pengelompokan pemuka pendapat (*opinion leader*) berdasarkan aktif tidaknya dalam perilaku;

- a. pemuka pendapat aktif (*opinion giving*) adalah ketika ia aktif mencari penerima atau followers untuk mengumumkan suatu informasi. Dimana seseorang mencari informasi dan meneruskannya kepada masyarakat. Ini sangat baik, karena tingkat kepercayaan kepadanya sangat tinggi, mengingat banyak masyarakat yang belum memahami suatu

permasalahan. Kelebihan dengan cara ini adalah tingkat kepercayaan terhadap pemuka pendapat sudah terbangun terlebih dahulu.

- b. pemuka pendapat pasif (*opinion seeking*) artinya pemuka pendapat dicari oleh followers-nya, dalam hal ini penerima aktif mencari sumber informasi kepada pemuka pendapat sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi.

Menurut analisis peneliti Pemuka pendapat (*opinion leader*) disini yang dimaksud adalah orang yang dipilih oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk menyampaikan surat pembatalan pembangunan Bendungan Rokan Kiri kepada masyarakat Cipang Raya. Dan dari kedua kategori yang dijelaskan diatas pemuka pendapat (*opinion leader*) yang dipilih oleh pemerintah daerah ini termasuk kedalam pemuka pendapat aktif (*opinion giving*) karena Rio Andri sangat aktif dan terus mendesak agar pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu segera mengeluarkan surat pembatalan pembangunan Bendungan yang diminta oleh masyarakat Cipang Raya.

Setelah menerima informasi dari pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu Rio Andri (*opinion leader*) tentang surat pembatalan pembangunan Bendungan Rokan Kiri, beliau melakukan cara tersendiri untuk menyampaikan surat pembatalan kepada masyarakat. Langkah- langkah yang dilakukan oleh Rio Andri dalam menyampaikan surat pembatalan kepada masyarakat adalah :

- a. Mengumpulkan orang-orang yang dianggap penting di lingkungan masyarakat Cipang Raya seperti Kepala Desa, tokoh adat, tokoh agama, mahasiswa, dan tokoh pemuda.
- b. Melakukan musyawarah bersama dengan tujuan langkah seperti apa yang efektif untuk menyampaikan surat pembatalan Bendungan Rokan Kiri kepada masyarakat Cipang Raya.
- c. Dengan melakukan musyawarah Rio Andri dengan tokoh penting dari masing-masing masyarakat Cipang Raya, akhirnya mendapatkan keputusan bahwa menyampaikan surat pembatalan kepada masyarakat dengan mengumpulkan masyarakat dari keempat Desa tersebut yaitu, Desa Cipang Kanan, Desa Cipang Kiri Hulu, Desa Cipang Hilir dan Desa Tibawan.
- d. Rio Andri dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa dari masing-masing Desa mengatur waktu dan tempat yang sesuai untuk menyampaikan informasi terkait surat pembatalan pembangunan kepada masyarakat.
- e. Dengan membutuhkan waktu kurang lebih 10 hari Rio Andri berhasil menyampaikan informasi tentang surat pembatalan kepada masyarakat Cipang Raya.

Sebenarnya seorang *opinion leader* harus menggunakan media sosial dalam penyebaran informasi kepada masyarakat, akan tetapi sesuai dengan situasi dan kondisi di masyarakat Cipang Raya yang tidak memungkinkan penggunaan media sosial untuk menyebarluaskan informasinya karena di Cipang Raya sendiri tidak adanya jaringan komunikasi atau internet. Jadi akses untuk masyarakat untuk membuka media sosial sangat sulit. Oleh karena itu Rio Andri sebagai

opinion leader lebih memilih untuk menyampaikan informasi tentang surat pembatalan secara langsung.

Menurut analisis peneliti dan temuan peneliti dilapangan berdasarkan cara yang dilakukan oleh Rio Andri sebagai *opinion leader* dalam menyampaikan surat pembatalan pembangunan Bendungan Rokan Kiri kepada masyarakat belum efektif karena beliau mengumpulkan hanya sebagian kecil masyarakat dari masing-masing Desa, seperti orang-orang yang dianggap penting dalam masyarakat contohnya aparat Desa, ketua RT, Ketua RW, tokoh adat, pemuda dan beberapa masyarakat biasa. Sedangkan masing-masing dari ke 4 Desa yang harus mendapatkan informasi terkait surat pembatalan Bendungan Rokan Kiri ada kurang lebih 1500 jiwa. Oleh karena itu cara yang dilakukan dalam menyampaikan surat belum efektif.

Menurut analisis peneliti cara pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam mengkomunikasikan surat pembatalan kepada masyarakat Cipang Raya dengan memilih orang kepercayaan masyarakat sendiri dengan tujuan agar masyarakat mudah percaya terhadap informasi yang disampaikan sebenarnya sudah cukup efektif dan hanya membutuhkan waktu 10 hari untuk informasi tersebut sampai ke masyarakat, akan tetapi alangkah lebih efektifnya apabila pemerintah daerah sendiri yang turun kelapangan untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Selain tidak membutuhkan waktu lama juga dapat mempererat hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Tanggapan masyarakat Cipang Raya terhadap informasi yang disampaikan oleh Rio Andri (*opinion leader*) terkait surat pembatalan pembangunan Bendungan Rokan Kiri adalah masyarakat langsung percaya dan merasa senang terhadap informasi yang disampaikan. Alasan masyarakat langsung percaya kepada Rio Andri dan informasi yang disampaikan adalah karena masyarakat mengenal dan juga menjadikan Rio Andri sebagai salah satu orang yang menjadi penyambung lidah masyarakat Cipang kepada pemerintah Daerah Rokan Hulu mengenai masalah pembangunan Bendungan Rokan Kiri.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisa terhadap hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa startegi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Rokan Hulu terkait surat pembatalan pembangunan Bendungan Rokan Kiri adalah:

1. Melakukan perencanaan komunikasi (*communication planing*) dengan melakukan musyawarah dengan Bupati Rokan Hulu, Sekretaris Daerah, perwakilan masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh pemuda, budaya serta tokoh pendidikan.
2. Melakukan manajemen komunikasi (*communication management*) maksud nya adalah pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu memilih orang yang tepat untuk menyampaikan surat kepada masyarakat yaitu memilih Rio Andri.
3. Melakukan pendekatan (*approach*) baik secara persuasif kepada perwakilan tokoh maupun kepada masyarakat secara umum. Dan juga melakukan pendekata kepada orang yang dipilih untuk menyampaikan surat pembatalan kepada msyarakat dengan tujuan agar surat pembatalan tersampaikan dengan baik.

Dan menurut analisis peneliti cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyampaikan surat pembatalan kepada masyarakat diatas sudah cukup efektif. Hal ini ditandai dengan adanya pengakuan dari masyarakat Cipang Raya yang mendapatkan informasi yang disampaikan oleh orang yang dipilih (Rio Andri) pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu.

B. Saran

1. Melakukan perencanaan komunikasi (*communication planing*)

Sebaiknya dalam proses perencanaan komunikasi kedepannya pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu harus biasa mengkomunikasi lebih baik lagi kepada masyarakat, dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat tidak akan ada konflik dan juga tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Melakukan manajemen komunikasi (*communication management*)

Sebaiknya dalam proses manajemen komunikasi atau lebih tepatnya cara yang dilakukan untuk menyampaikan surat kepada masyarakat Cipang Raya akan lebih efektif apabila pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu sendiri yang turun kelapangan untuk menyampaikan informasi tersebut, selain lebih efektif juga tidak perlu memakan waktu yang lama.

3. Melakukan pendekatan (*approach*)

Dalam proses pendekatan pemerintah daerah sudah cukup baik dan efektif hal ini dibuktikan dengan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu mau mendengarkan aspirasi dari masyarakat Cipang raya.

Terlepas dari ketiga cara diatas seharusnya pemerintah daerah melakukan evaluasi (evaluation) terhadap cara yang dilakukan untuk menyampaikan surat pembatalan kepada masyarakat sudah efektif atau belum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arrianie Lely, 2010. *Komunikasi Politik*, Widya Padjadjaran
- Bungin, Burhan. 2005. *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Butterick Keith, 2014. *Pengantar Public Relations*. Jakarta: Remaja Pers.
- Cangara Hafied, 1998. *pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Remaja Grafindo.
- _____. 2014. *pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Remaja Grafindo.
- _____. 2015. *pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Remaja Grafindo.
- Effendy, Onong Uchjana, 2011. *Ilmu Komunikasi Toeri dan Praktek*.
PT.Roadakarya: Bandung
- Hasan, Erliana, 2010 *Komunikasi Pemerintah*. Bandung. PT. Refika Refika
Aditama
- Herdiansyah, 2015. *Komunikasi Pelayanan Publik*. Gava Media: Yogyakarta
- Jaya, I Made Laut Mertha. 2020. *Metode Penelitian Kuntitatif Dan Kualitatif*.
Yogyakarta: Quadrant
- Koesmowidjojo, Suci R. 2021. *Dasar-Dasar Komunikasi*. Jakarta:Gramedia
- Mulyana, Dedy. 2017. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja.
- Ndraha.Talizidu. 2015.*Kybernology*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rudy May, 2005. *Komunikasi & Hubungan Masyarakat Internasional*, Bandung:
PT Refika Aditama
- Sedarmayanti, 2018. *Komunikasi Pemerintahan*, , Bandung: PT Refika Aditama.

Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

West,R & Turner, L.H. 2008. *pengantar teori komunikasi*, Jakarta: Salemba Humanika

JURNAL/SKRIPSI

Aulia Rahman & Diah Fatma Sjoraida. (2017). *Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Subang Mensosialisasikan Gerakan Pemabngunan Untuk Rakyat Infrastruktur Berkelanjutan*, jurnal Kajian Komunikasi. Volume 5.Nomor 2.

Agusly Irawan Aritonang. (2011). *Kebijakan Komunikasi Di Indonesia UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jurnal Komunikasi.Volume B 1. No 3.

Haidir Fitra Siagian. (2013) . *Partisipasi Efek Komunikasi Pemuka Pendapat Dalam Pembangunan*. Jurnal Dakwah Tabligh. Volume 14. No. 1

Muhammad, Ahmad. (2019). *Peranan Camat Dan Komunikasi Pemerintahan Terhadap Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang*. Jurnal Ilmiah Clean Govenment. Volume 2. Nomor 2.

Muthi Amila. (2016). *Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Benduangan Jatigede Di Desa Wado*. Jurnal. Volume 6. Nomor 2.

Suwari Akhmaddhian. (2017). *Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Sumber Daya Air Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan*. Jurnal Unifikasi. Volume 4 Nomor 1.

Sintje Rondonuwu. 2018. *Peranan Opinion Leader Dalam Menyampaikan Pesan Tentang Pembangunan Desa Lantung Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 3. No. 45.

Ulber Silalahi. (2014). *Komunikasi Pemerintahan Mengirim Dan Menerima Informasi Tugas Dan Informasi Publik*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 3. Nomor 1.

Yohanes ,Leope. (2018) *Komunikasi Pemerintah Antar Perangkat Daerah Di Provinsi Nus Tenggara Timur (NTT)*. Jurnal Penelitian Komunikasi. Volume 21 Nomor 1.

Web

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190214123837-4-55506/sederet-bukti-konkret-pembangunan-infrastruktur-era-jokowi>

<https://riapos.jawapos.com/riau/25/04/2018/181199/53-kategoriberita-siak.html>

<https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/p-proyek-bendungan-dan-jaringan-irigasi>

Perundang – undangan

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005

peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2007 tentang proyek satrategis Nasional.

UU. No. 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah.

Undang- Undang 32 tahun 2004 Prinsip - Prinsip ekonomi Daerah .